



KABUPATEN HALMAHERA BARAT

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP 2024)



Jl. Pengabdian No.1 Desa Porniti Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Provinsi Maluku Utara



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KATA PENGANTAR

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG, S.Pd., M.M

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Semoga laporan yang disampaikan ini dapat diterima dan dipahami serta memaknai sebagai perubahan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam memperbaiki capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tidak terlepas dari koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama Tim Penyusun dan pihak terkait lainnya.

Berbagai dinamika sosial, ekonomi dan regulasi nasional yang berkembang laju di pusat dan daerah semakin memberi penguatan otonomisasi dan peran pemerintah di Daerah. Hal ini menuntut kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Program dan Kegiatan dari setiap sasaran dan indikator yang diamanatkan oleh Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 04 November 2021 sebagai dokumen perencanaan 5 tahun dalam rangka mencapai Visi dan Misi organisasi secara terukur, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periode sebagai amanat dari pelaksanaan terhadap implementasi Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan Visi, Misi, Sasaran serta Indikator Kinerja yang selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Organisasi yang ditetapkan. Untuk Menjabarkan Pelaksanaan Dokumen tersebut yang termaktub dalam Dokumen RPJMD maka ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 yang kemudian direpresentasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Halmahera Barat Tahunan sebagai target dan sasaran tercapaian tujuan dari visi dan misi Bupati Halmahera Barat di Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 ini diharapkan tidak sebatas sajian data dan analisis capaian kinerjanya tapi menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi yang sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran, Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Goverment*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) ini dibuat, untuk diketahui dan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ke depan menjadi lebih baik dalam menjalankan amanat Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia.

Jailolo, 31 Desember 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG, SPd., MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintah yang baik merupakan prasyarat setiap Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam rangka itu diperlukan media informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kebijaksanaan Pembangunan Administrasi Publik merupakan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan secara rasional harus berpedoman pada paradigma baru organisasi pembelajaran, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan sosial budaya, pembangunan hukum dan pemerintahan yang baik *Good Governance*.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan capaian kinerja Dinas, Badan dan Kantor dalam satuan unit kerja Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Hasil pengukuran kinerja yang didasarkan indikator input (masukan), output (keluaran) dan Outcome (hasil) menunjukkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja dengan menggunakan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran bahwa beberapa program / kegiatan tahun 2024 menunjukkan kinerja sebagai berikut :

1. Secara umum Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun Anggaran 2024 baik, ini dapat terlihat dari sebagian besar sasaran yang dicapai dengan tingkat indikator capaian kinerja dapat terealisasi sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Bupati Halmahera Barat dengan demikian dapat dikatakan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 oleh instansi di lingkup Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai rencana *strategik* dan ini diharapkan dapat lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.
2. Dari analisa indikator capaian kinerja dapat terealisasi bukan berarti pelaksanaan program kegiatannya tidak mengalami kendala, hambatan dan tantangan, ini terlihat sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan kadang tidak dapat berjalan, disamping itu juga masih terdapat kendala pada besaran dana/anggaran dan kondisi geografis daerah.
3. Sebagai penerapan *Good governance* dewasa ini telah diimplementasi dengan pertanggungjawaban yang akuntabel, maka diharapkan terciptanya suatu pemerintahan yang baik dalam bentuk penyampaian Laporan atas Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL		
KATA PENGANTAR	-----	i
IKHTISAR EKSEKUTIF LAKIP	-----	iii
Daftar Isi	-----	iv
Daftar Tabel	-----	v
Daftar Gambar	-----	vii
 BAB I PENDAHULUAN	-----	1
A. Latar Belakang	-----	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Barat	-----	2
1. Kondisi Geografis	-----	2
2. Kondisi Demografi	-----	14
3. Kondisi Pemerintahan	-----	19
4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)	-----	23
Aparatur		
5. Kondisi Sarana dan Prasarana	-----	27
6. Isu Strategis Daerah	-----	29
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	-----	31
A. Visi Dan Misi	-----	31
B. Tujuan, Sasaran	-----	39
C. Perjanjian Kinerja	-----	41
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	-----	44
A. CAPAIAN KINERJA	-----	44
1) Sasaran Ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	-----	47
2) Sasaran Ke-2 Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	-----	55
3) Sasaran Ke-3 Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata.	-----	61
4) Sasaran Ke-4 :Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	-----	66
5) Sasaran Ke-5 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan	-----	75
6) Sasaran Ke-6 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	-----	80
7) Sasaran Ke- : Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	-----	85
B. REALISASI ANGGARAN	-----	88
BAB IV PENUTUP	-----	114
LAMPIRAN		
1. Perjanjian Kinerja		
2. Reviuw Inspektorat Kab. Halmahera Barat		
3. Dokumen Pendukung		

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel I.1	Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024	-----	3
Tabel I.2	Luas Wilayah (Ha) Menurut Ketinggian di Kabupaten Halmahera Barat	-----	5
Tabel I.3	Kemiringan Lereng dan Luasnya di Kabupaten Halmahera Barat	-----	6
Tabel I.4	Desa Pesisir dan Desa Bukan Pesisir Di Kabupaten Halmahera Barat	-----	6
Tabel I.5	Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Halmahera Barat	-----	10
Tabel I.6	Nama Mata Air, Lokasi dan Debitnya Di Kabupaten Halmahera Barat	-----	11
Tabel I.7	Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Barat	-----	12
Tabel I.8	Kondisi Klimatologi Kabupaten Halmahera Barat Kondisi Klimatologi Kabupaten Halmahera Barat	-----	12
Tabel I.9	Kondisi Cuaca Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022	-----	13
Tabel I.10	Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat	-----	14
Tabel I.11	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024	-----	15
Tabel I.12	Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Status Pekerjaan di Kab. Halbar	-----	16
Tabel I.13	Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kab. Halmahera Barat Tahun 2024	-----	17
Tabel I.14	Populasi dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat	-----	18
Tabel I.15	Presentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat	-----	19
Tabel I.16	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan, Jenis kelamin di Kabupaten Halmahera Barat	-----	24
Tabel I.17	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat	-----	24
Tabel I.18	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera	-----	25

	Barat		
Tabel I.19	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	-----	26
Tabel I.20	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin	-----	27
Tabel I.21	Sarana dan Prasarana	-----	27
Tabel III.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	-----	47
Tabel III.2	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	-----	47
Tabel III.3	Pembandingan antara tahun ini dan tahun	-----	48
Tabel III.4	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2020–2024 Human Development Index by Regency/Municipality in Maluku Utara Province, 2020–2024	-----	48
Tabel III.5	Perbandingan capaian kinerja dengan dokumen strategis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat	-----	49
Tabel III.6	Program dan Kegiatan	-----	50
Tabel III.7	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	-----	53
Tabel III.8	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun	-----	53
Tabel III.9	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Maluku Utara	-----	54
Tabel III.10	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2022-2024	-----	54
Tabel III.11	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	-----	55
Tabel III.12	Rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota Maluku Utara	-----	55
Tabel III.13	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2021-2023	-----	56
Tabel III.14	perbandingan capaian kinerja dengan dokumen strategis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat	-----	56
Tabel III.15	Program dan kegiatan	-----	60
Tabel III.16	Sasaran Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	-----	61
Tabel III.17	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	-----	61
Tabel III.18	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun	-----	67

	ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir		
Tabel III.19	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	-----	67
Tabel III.20	Program dan Kegiatan	-----	68
Tabel III.21	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	-----	69
Tabel III.22	Sasaran Indikator dan Target	-----	69
Tabel III.23	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	-----	70
Tabel III.24	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	-----	70
Tabel III.25	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	-----	71
Tabel III.26	Kunjungan wisatawan tahun 2024	-----	71
Tabel III.27	Kunjungan wisatawan tahun 2022-2023	-----	72
Tabel III.28	Program dan Kegiatan	-----	74
Tabel III.29	Menurunnya Tingkat kemiskinan	-----	75
Tabel III.30	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	-----	75
Tabel III.31	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	-----	75
Tabel III.32	Angka kemiskinan data BPS Halmahera Barat	-----	76
Tabel III.33	Perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat	-----	76
Tabel III.34	Program dan Kegiatan	-----	79
Tabel III.35	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	-----	80
Tabel III.36	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	-----	81
Tabel III.37	Perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat	-----	82
Tabel III.38	Program dan Kegiatan	-----	84
Tabel III.39	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	-----	85

Tabel III.40	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.	-----	85
Tabel III.41	Program dan Kegiatan perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat	-----	85
Tabel III.42	Tabel Program dan Kegiatan Yang berkaitan dengan Perjanjian Kinerja	-----	87

Halaman

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 Peta Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024	4
Gambar I.2 Peta Topografi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat	7
Gambar I.3 Peta Geologi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat	9
Gambar II.1 Kerangka Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	37
Gambar II.2 Kerangka Hubungan Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah	41
Gambar: III.1 Gambar Lokasi Jalan Sebelum Pengaspalan	62
Gambar:III.2 Gambar Proyek Jalan Leger	63
Gambar:III.3 Gambar Proyek Pemantapan Jalan	64
Gambar:III.4 Gambar Proyek Pemantapan Jalan	65
Gambar: III.5 Gambar Proyek Pemantapan Jalan	66
Gambar: III.6 Gambar Proyek Pemantapan Jalan	66
Gambar: III.7 Penyerahan hasil WTP di BPK.R.I Perwakilan MALUT di Ternate	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 dinyatakan bahwa azas - azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban.

Juga sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*

atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tiga pilar *Good Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, tiga pilar ini merupakan *spirit* yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Halmahera Barat adalah salah satu kabupaten yang secara administrasi wilayah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara. Pemekaran dimaksud telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Secara Astronomis Kabupaten Halmahera Barat berada pada 00 48' lintang utara sampai 10 48' lintang utara, serta 1270 16' 00" bujur timur sampai 1270 16' 01" bujur timur. Luas Kabupaten Halmahera Barat tercatat 2.239,114 km² dan jumlah pulau sebanyak 165. Luas laut 7.124,45 km² dan luas daratan 2.238,33 km² dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Loloda seluas 300,66 km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Ibu 109,82 km². Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat terletak di Jailolo.

Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Ibu, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Tabaru, Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda Tengah. Pada saat pemekaran, Kabupaten Halmahera Barat memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu dan Kecamatan Loloda. Seiring perjalanan waktu dan pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat serta rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Jailolo. Tidak berselang lama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Ibu Utara

dan Kecamatan Ibu Selatan, sehingga sejak saat itu Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017, Kecamatan Jailolo Timur masuk wilayah Pemerintahan Halmahera Utara lalu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 Kecamatan Jailolo Timur kembali masuk ke dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat, kemudian dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan pemekaran wilayah Kecamatan Loloda menjadi Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda Tengah dengan kode wilayah 820110, yang terletak di 122 pulau tanpa penghuni dan 2 (dua) pulau berpenghuni yaitu Pulau Halmahera dan Pulau Nusa Kahatola. Kecamatan Loloda Tengah dalam hal database wilayah melalui Badan Pusat Statistik masih dilakukan pencatatan bersama dengan Kecamatan Loloda.

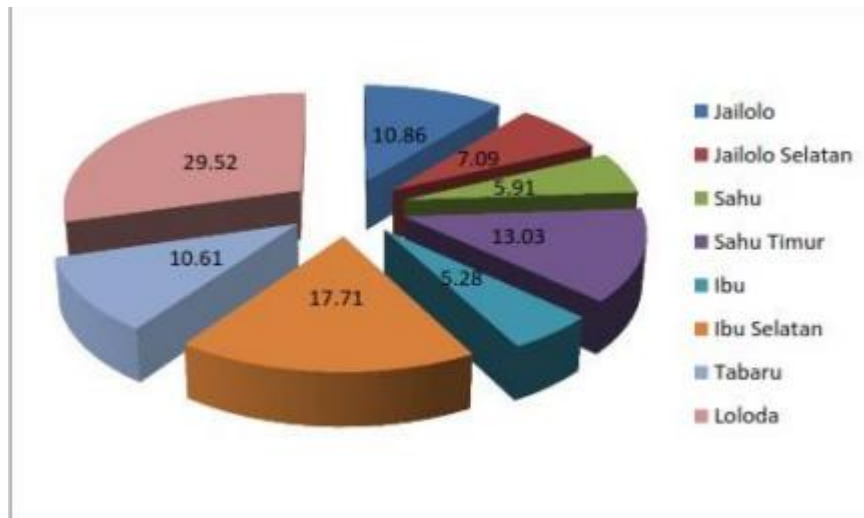
Luas wilayah dan jumlah desa di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada table di bawah ini.

Tabel : I.1
Luas Wilayah Per Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
1	Jailolo	226,00	34
2	Jailolo Selatan	-	22
3	Sahu	122,86	19
4	Sahu Timur	271,00	18
5	Ibu	109,82	17
6	Ibu Selatan	368,33	16
7	Tabaru	220,64	16
8	Loloda	-	17
9	Loloda Tengah	-	10
	Jumlah	2.239,114	173

Sumberdata: Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2024

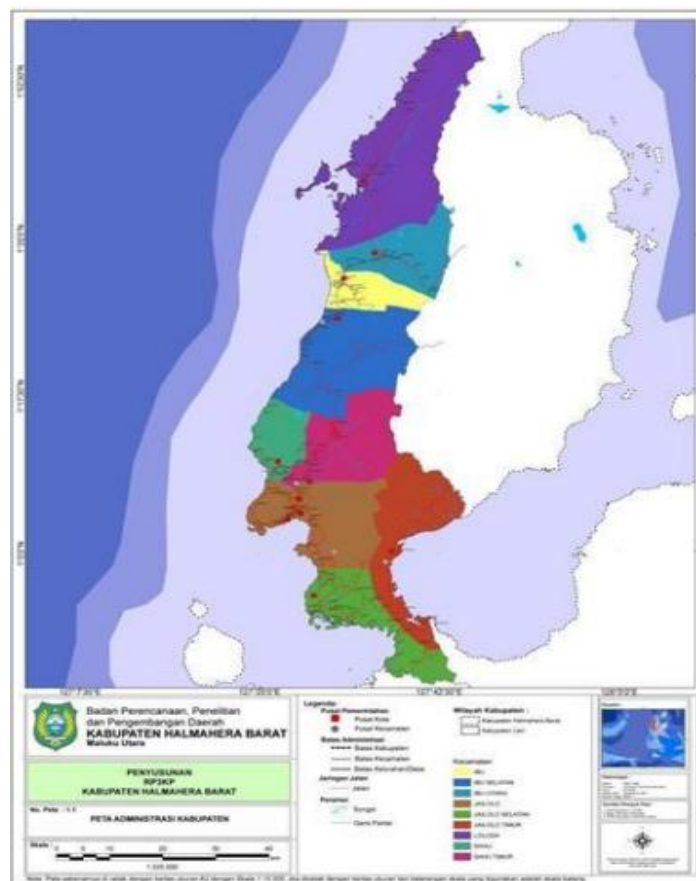
Diagram I.1. Presentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Barat



Sumber Data: Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2024

Untuk memberikan informasi mengenai letak dan posisi letak geografis Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana peta pada gambar di bawah ini.

Gambar : I. 1
Peta Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023



Sumber Data: Bappeda Kab. Halbar, Tahun 2024

Wilayah Kabupaten Halmahera Barat terletak pada ketinggian antara 0 – 2.000-meter diatas permukaan air laut (dpl). Sebagaimana data yang tersaji dalam Tabel I.2, berdasarkan ketinggiannya, RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032 mengelompokkan wilayah Kabupaten Halmahera Barat menjadi 2 (dua), yaitu daerah dengan ketinggian di bawah 750-meter dpl dan daerah dengan ketinggian diantara 750– 2.000-meter dpl.

Tabel I.2
Luas Wilayah (Ha) Menurut Ketinggian
di Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Ketinggian (Meter DPL)	
		< 750	750 – 2000
1	Jailolo	25.120,6	7,00
2	Jailolo Selatan	31.332,8	2.039,5
3	Sahu	54.336,4	1.238,5
4	Sahu Timur		
5	Ibu	49.314,8	4.316,6
6	Ibu Selatan		
7	Tabaru		
8	Loloda	55.409	351,5
9	Loloda Tengah		
Halmahera Barat		215.513,6	7.953,1

Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Dari tabel, dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah daratan Kabupaten Halmahera Barat berada pada ketinggian di bawah 750 mdpl yaitu seluas 215.513,6 Ha atau 96 persen dari luas wilayah daratan secara keseluruhan. Wilayah dengan ketinggian di atas 750 mdpl sebagian besar terdapat pada Kecamatan Ibu yaitu seluas 4.316,6 atau 54,3 persen dari luas wilayah dengan ketinggian 750 – 2.000 mdpl. Sementara berdasarkan hasil penelitian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Barat berada pada kemiringan lereng 0-8% dan 8-16%. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji pada table berikut.

Tabel I.3
Kemiringan Lereng dan Luasnya di Kabupaten Halmahera Barat

Kemiringan Lereng	0-8%	8-16%	16-24%	24-32%	31-40%	>40%	Total
Luas (Ha)	67.203,8	53.054,9	38.923,2	21.668,2	12.277,2	9.223,0	202.350,6
Persentase Luas (%)	33,21	26,22	19,24	10,71	6,07	4,56	100,00

Sumber: Buku Data dan Analisis RTRW Kab. Halbar 2012-2032

Kabupaten Halmahera Barat memiliki 173 desa, dimana 89 atau 51,44 persen diantaranya adalah Desa di wilayah pesisir. Wilayah dengan proporsi desa pesisir terbesar adalah Kecamatan Jailolo Selatan dan Ibu Selatan. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.4
Desa Pesisir dan Desa Bukan Pesisir
Di Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Pesisir		Desa Bukan Pesisir	
			Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1	Jailolo	34	21	12,14	13	7,51
2	Jailolo Selatan	26	16	9,23	10	5,78
3	Sahu	19	10	5,78	9	5,20
4	Sahu Timur	18	-	-	18	10,40
5	Ibu	17	5	2,89	12	6,94
6	Ibu Selatan	16	14	8,09	2	1,16
7	Tabaru	16	-	-	16	9,23
8	Loloda	17	14	8,09	3	1,73
9	Loloda Tengah	10	9	5,20	1	0,58
Halmahera Barat		173	89	51,44	84	48,56

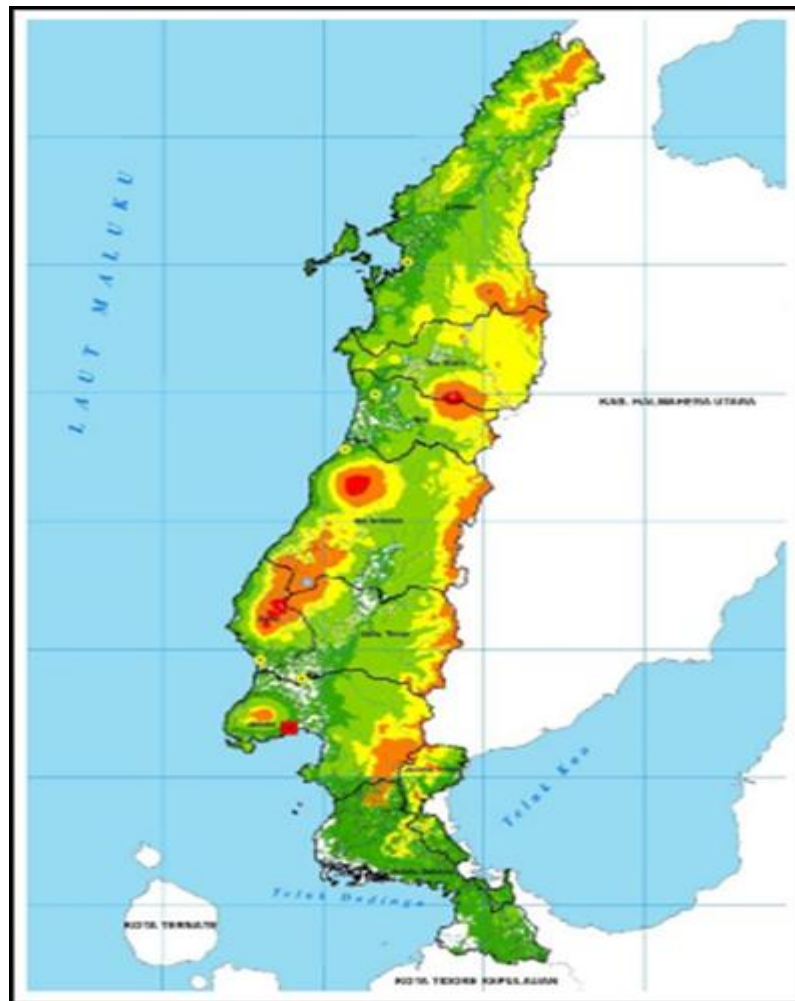
Sumber: BPS, Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2024

Di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 4 (empat) gunung berapi yang hingga kini masih aktif. Gunung-gunung yang membentang sepanjang daratan Halmahera Barat ini, yaitu Gunung Jailolo di Kecamatan Jailolo (975 mdpl), Gunung Onu di Kecamatan Sahu (1.075mdpl), Gunung Gamkonora di Kecamatan Ibu Selatan (1.525 mdpl), Gunung Ibu di

Kecamatan Tabaru (1.025 mdpl).

Peta topografi wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

Gambar I.2. Peta Topografi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Formasi geologi Pulau Halmahera berdasarkan pada peta geologi lembar ternate terbagi dalam tiga mandala (bagian utama) yaitu Mandala Halmahera Timur, Halmahera barat termasuk Pulau Morotai, dan Busur Kepulauan Gunung Api Kuarter yang meliputi pulau-pulau kecil di bagian barat Pulau Halmahera. Mandala Halmahera Barat meliputi bagian Utara dan lengan Selatan Halmahera. Morfologi mandala berupa perbukitan yang tersusun atas Batuan Sedimen, pada Batu gamping berumur Neogen dan morfologi karst dan di beberapa tempat terdapat morfologi kasar yang merupakan cerminan batuan gunung api berumur oligosen. Mandala busur

kepulauan gunung api kuarter meliputi pulau-pulau kecil di sebelah barat pulau Halmahera. Deretan pulau ini membentuk suatu busur kepulauan gunung api kuarter. Sebagian pulaunya mempunyai kerucut gunung-gunung api yang masih aktif.

Kondisi fisiologi Kabupaten Halmahera Barat cukup bervariasi, yakni pada bagian timur dilalui oleh jalur Gunung Api Kuarter yang terdiri dari barisan gunung api aktif dan non aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Luas daerah bukit/pegunungan di Halmahera Barat adalah 138.499.5 Ha atau sekitar 61,98 % dari luas wilayah. Pada bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara hingga pesisir Pantai Jailolo dilalui Gunung Api Kuarter sehingga wilayah ini mempunyai pegunungan yang rapat dengan beberapa gunung api yang masih aktif. Di semenanjung pantai bagian barat yaitu pada Kecamatan Ibu dan Sahu merupakan daerah pegunungan dengan lereng yang curam (>40 %).

Struktur geologi wilayah Halmahera Barat merupakan bantuan jenis tertuayang berupa Batu-batuan Gunung Api Oligo Miose, Batuan Sedimen yang berumur Miosen sampai Poliosem dengan karakter Sedimen Tufaan. Struktur geologi wilayah Halmahera Barat umumnya terbentuk pada Jaman Pratersier hingga Kwarter. Formasi Geologi Jaman Pratersier terdiri dari batuan Kristal, Phylit, Batu Sabah, Serpih Liat, Batu Liat, Batu Gamping, dan Eroptip. Sedangkan formasi jaman Kwarter terdiri dari Alluvium, Pasir Lumpur, Krikil, dan Koral. Berdasarkan jenis batumannya maka struktur batuan yang ada sebagian besar tersusun atas batuan sedimen dan vulkanik dengan struktur lipatan berupa sentuhan (contact) dan patahan (fault).

Jenis batuan sedimen terdapat di Kecamatan Loloda Selatan, Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, Sahu, Sahu Timur, dan Jailolo. Sedangkan jenis Batuan Vulkanik terdapat di Kecamatan Jailolo Selatan.

Adapun karakteristik tanah di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan sifat-sifat yang berbeda mulai dari Kecamatan Jailolo Selatan di bagian selatan hingga Kecamatan Loloda Selatan di bagian utara Halmahera Barat yang dipengaruhi oleh proses-proses geologi dan iklim. Menurut jenis medianya dan proses geologi yang mempengaruhinya, jenis

tanah pada Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari Jenis Tanah Alluvial, Latosol, Regosol, dan Podsolik Merah Kuning. Sebaran dari masing-masing jenis tanah di daerah Kabupaten Halmahera Barat antara lain:

- 1) Jenis Tanah Alluvialter dapat pada Kecamatan Jailolo Selatan dan Jailolo Timur;
- 2) Jenis Tanah Latosol terdapat pada Kecamatan Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Jailolo dan Loloda Selatan;
- 3) Jenis Tanah Regosol terdapat pada kecamatan Jailolo, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, dan Loloda Selatan; dan
- 4) Jenis Tanah Podsolik Merah Kuning terdapat pada Kecamatan Loloda Selatan.

Sedangkan Menurut Taxonomy USDA tahun 1998, tanah diwilayah Kabupaten Halmahera Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok A: Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludalfs, Hapludoxs, Eutrudoxs.
- b. Kelompok B: Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludalfs, Hapludoxs, Eutrudoxs, Udipsaments.
- c. Kelompok C: Hapludalfs, Hapludults, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludolls.
- d. Kelompok D: Hapludults, Hapludalfs, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludands, Udorthents.
- e. Kelompok E: Hapludalfs, Hapludults, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludolls.
- f. Kelompok F: Sulfaquents, Sulfihemists, Sulfaquents.

Adapun Peta geologi wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.3. Peta Geologi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Kondisi hidrologi Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari sungai, danau dan air permukaan tanah. Sumber air selain berasal dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari danau, sungai dan kali, seperti Sungai Ake Diri, Ake Lamo, Ake Todowongi, Ake Sidangoli, Ake Nyinyiwit, Ake Sasur, Ake Tacici, Ake Ngibut, Ake Tahafo, Ake Duono dan Ake Tafangu. Nama-nama sungai-sungai yang besar yang melalui beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.5
Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Sungai	Lokasi (Kecamatan)	Panjang (m)
1	Ake Diri	Jailolo	8.120
2	Ake Lamo	Jailolo	6.597
3	Ake Todowongi	Jailolo	9.765
4	Ake Sidangoli	Jailolo Selatan	3.806
5	Ake Nyinyiwit	Jailolo Timur	9.547
6	Ake Sasur	Sahu	3.445
7	Ake Tacici	Sahu	2.116
8	Ake Ngibut	Sahu Timur	3.460
9	Ake Tahafo	Ibu	5.691
10	Ake Duono	Tabaru	5.019
11	Ake Tafangu	Ibu Selatan	7.791

Sumber: Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2024

Di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 4 (empat) danau, yaitu Danau Rano yang terletak di Kecamatan Sahu, Danau Gamkonora di Kecamatan Ibu, serta Danau Duono dan Danau Todoke di Kecamatan Tabaru.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tersebut bergerak di dalam ruang antar butir-butir tanah dan meresap ke dalam tanah lalu bergabung membentuk lapisan di dalam tanah yang disebut akuifer. Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara dalam Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Halmahera Utara (termasuk Halmahera Barat), Daerah sekitar Jailolo, Susupu, Ibu dan Goin di Pulau Halmahera merupakan daerah paling prospektif kandungan air tanahnya, mengingat daerah tersebut merupakan bagian kaki gunung Strato, dimana

aliran air tanah yang berasal dari puncak dan tubuh gunung api tertahan oleh batuan padu yang berumur lebih tua.

Akuiferter penting di daerah gunung Strato adalah lava basal berstruktur versikuler dan tufa, tercatat munculnya beberapa mata air dari akuifer tersebut dengan debit dapat mencapai lebih dari 100 l/dt. Akuifer di daerah perbukitan bergelombang umumnya mempunyai produktifitas rendah dan setempat berarti, airtanah dengan jumlah terbatas masih dapat diperoleh di lembah-lembah. Kelompok batuan vulkanik tak teruraikan dapat diharapkan bertindak sebagai sebagai akuifer produktif dengan kelulusan sedang. Potensi debit mata air yang terdapat di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel I.6
Nama Mata Air, Lokasi dan Debitnya
Di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Mata Air	Lokasi (Kecamatan)	Debit (lt/dt)
1	Sosa iku 1	Ibu	100,0
2	Sosa iku 2	Ibu	500,0
3	Pancuran	Ibu	10,0
4	Akeboso	Ibu	300,0
5	Goiu	Ibu	0,5
6	Tuladi	Ibu	0,2
7	Kawao	Sahu	0,5
8	Gamkonora	Sahu	500,0
9	Duter	Jailolo	200,0
10	Gurutu	Jailolo	100,0
11	Golo	Jailolo	30,0
12	Aketola	Jailolo	500,0
13	Rugasi	Jailolo	1,0
14	Jailolo	Jailolo	300,0
15	Gurango	Jailolo	400,0

Sumber: Buku Data dan Analisis RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2023

Tabel I.7
Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Barat

No. CAT	Cekungan Air Tanah (CAT)		Jumlah Air Tanah [jutam ³ /tahun]		Kategori CAT	
	Nama	Luas [Km ²]	Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	Prov	Kab/Ko ta
320	Ibu	756	454	249	x	
322	Jailolo-Sidangoli	1576	531	177	x	
	Total	2.332	985	426	2	

Sumber Data: RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024

Dari tabel, di wilayah Kabupaten Halmahera Barat juga terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) yang merupakan CAT kategori provinsi.

Kondisi klimatologi Kabupaten Halmahera Barat secara umum adalah iklim laut tropis dan iklim musim dengan curah hujan 1500-3500 mm/tahun. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Barat merupakan perairan laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Data perkembangan cuaca tahun 2022 di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel I.8
Kondisi Klimatologi Kabupaten Halmahera Barat

	Uraian	Persentase
1	Suhu (0C) :	
	a. Maksimum.	33,80
	b. Minimum.	23,00
	c. Rata-rata.	26,90
2	Kelembaban Udara :	
	a. Maksimum	98,00
	b. Minimum	52,00
	c. Rata-rata	81,90
3	Tekanan Udara (mb)	1.0007,50

Sumber data : Kabupaten Halbar Dalam Angka, Tahun 2022

Iklim Kabupaten Halmahera Barat secara umum adalah iklim laut tropis dan iklim musim, disebabkan sebagian besar wilayah Halmahera Barat merupakan perairan laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi

sangat dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Tabel I.8 menyajikan kondisi cuaca Kabupaten Halmahera Barat yang meliputi suhu udara, kelembaban udara, dan tekanan udara sepanjang tahun 2022.

Tabel I.9
Kondisi Cuaca Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022

Bulan	Suhu Udara(°C)			Kelembaban Udara (persen)			Tekanan Udara (mb)		
	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max
Januari	23,8	27,4	33,2	67,0	83,6	97,0	1.001,8	1.006,8	1.011,8
Februari	23,8	28,0	33,2	64,0	83,9	98,0	1003,6	1.007,7	1.011,6
Maret	24,0	28,0	33,6	67,0	86,5	98,0	1003,5	1.007,3	1.011,1
April	24,2	28,1	33,5	68,0	86,9	98,0	1003,7	1.007,3	1.010,6
Mei	24,6	28,4	33,6	60,0	85,7	98,0	1001,7	1.006,7	1.011,7
Juni	23,6	27,4	33,4	70,0	87,6	99,0	1003,2	1.006,7	1.010,4
Juli	23,6	26,9	32,4	69,0	87,8	100,0	1.003,0	1.006,1	1.009,7
Agustus	23,6	27,3	33,0	60,0	84,9	98,0	1003,1	1.006,8	1.010,6
September	23,0	27,0	33,0	60,0	87,3	97,0	1.002,1	1.006,6	1.010,5
Oktober	23,4	27,3	33,4	60,0	87,0	97,0	1.002,2	1.005,8	1.010,4
November	24,0	27,6	33,2	63,0	87,4	98,0	1.002,2	1.006,0	1.010,0
Desember	23,8	27,7	32,6	44,0	85,4	98,0	1.001,0	1.005,2	1.009,0

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2022

Sebagaimana tersaji, rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2022 berada padakisaran 26,9 derajat celcius hingga 28,4 derajat celcius. Suhu terendah tercatat pada bulan September, yaitu 23 derajat dan suhu tertinggi pada bulan Maret dan Mei, yaitu 33,6 derajat. Rata-rata kelembaban udara sepanjang tahun 2020 berada padarentang 83,8 persen hingga 87,8 persen. Rata-rata tekanan udara sepanjang tahun 2022 berada pada kisaran 1005,2 mb hingga 1007,7 mb.

Adapun curah hujan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 sebesar 672 mm atau lebih rendah dibandingkan kondisi di tahun 2021 dan 2022. Jumlah hari hujan dalam setahun pada tahun 2022 lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2022 namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

2. Kondisi Demografi

Sampai dengan tahun 2024 penduduk Kabupaten Halmahera Barat berjumlah 139.764 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 71.695 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 68.069 jiwa. Data dan informasi tentang pertumbuhan penduduk per kecamatan dan tingkat kepadatan penduduk, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada table di bawah ini.

Tabel I.10
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
		Km2	%	Jiwa	%	
1	Jailolo	226,00	10,30	37.659	26,94	166,63
2	Jailolo Selatan	-	-	25.094	17,95	-
3	Sahu	122,86	5,60	12.560	8,98	102,23
4	Sahu Timur	271,00	12,35	11.533	8,25	42,56
5	Ibu	109,82	5,00	13.083	9,37	119,13
6	Ibu Selatan	368,33	16,79	15.824	11,33	42,96
7	Tabaru	220,64	10,05	10.107	7,23	45,81
8	Loloda	-	-	9.219	6,60	-
9	Loloda Tengah	-	-	4.685	3,35	-
	Jumlah	2.239,114	100	139.764	100	62,42

Sumberdata: Dinas Dukcapil Kab. Halmahera Barat 2024

Kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini, kiranya dapat dijadikan masukan dalam merumuskan berbagai strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan program/kegiatan oleh seluruh Masyarakat dapat terjadi jika dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas.

Sebaran penduduk di 9 (sembilan) kecamatan dalam periode tahun 2024 dan pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada table di bawah ini.

Tabel I.11
Data Penduduk Berdasarkan Jenis
Kelamin Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah	Rasio Jenis kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	Jailolo	19.252	18.407	37.659	104.59
2	Jailolo Selatan	12.790	12.304	25.094	103.95
3	Sahu	6.390	6.170	12.560	103.56
4	Sahu Timur	5.959	5.574	11.533	106.91
5	Ibu selatan	8.157	7.667	15.824	106.39
6	Ibu	6.723	6.360	13.083	105.71
7	Tabaru	5.228	4.879	10.107	107.15
8	Loloda	4.759	4.460	9.219	106.70
9	Loloda Tengah	2.437	2.248	4.685	108.41
Jumlah		71.695	68.069	139.764	105.33

Sumberdata: Dinas Dukcapil Kab. Halbar Tahun 2024

Selain data sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk melengkapi informasi tentang potensi bonus geografi yang akan dikelola sebagai salah satu kekuatan yang akan mendorong untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2024 meliputi gambaran tentang pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan status pekerjaan dan pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok usia.

Kedua data dan informasi tersebut, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik di bawah ini.

Tabel I.12
Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Status Pekerjaan
Kabupaten Halmahera Barat

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment ¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment ²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	25.107	129	25.236	99,49
1	11.647	0	11.647	100,00
2	25.080	2.030	27.110	92,51
3	8.764	427	9.191	95,35
Jumlah/Total	70.598	2.586	73.184	96,47

Catatan/Note: ¹ 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School
1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School
2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School
3. Perguruan Tinggi/Collage
² 1. Mencari pekerjaan/Looking for work
2. Mempersiapkan usaha/Establishing a new business/firm
3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/Feeling hopeless in looking for work (discouraged job seekers)
4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/Having job already but not starting to work yet

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Sedangkan data dan informasi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini.

Tabel I.13
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	3.868	3.539	7.407
5–9	5.883	5.345	11.228
10–14	6.320	5.878	12.198
15–19	7.026	6.354	13.380
20–24	7.416	6.677	14.093
25–29	6.407	6.189	12.596
30–34	5.516	5.270	10.786
35–39	5.410	5.362	10.772
40–44	5.436	5.471	10.907
45–49	4.932	4.952	9.884
50–54	4.131	3.805	7.936
55–59	3.175	2.997	6.172
60–64	2.302	2.246	4.548
65–69	1.752	1.773	3.525
70–74	1.087	1.080	2.167
75+	1.034	1.131	2.165
Halmahera Barat	71.695	68.069	139.764

Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka, Tahun 2024

Berdasarkan Data kelompok usia ini, memberi gambaran bahwa kelompok usia Halmahera Barat, masuk dalam kategori kelompok usia muda, dimana populasi penduduk usia anatar 10 sd 20 tahun yang cukup menebal, dalam 5 tahun kedepan akan bergeser sebagai kelompok usia produktif, yang dikenal dengan Bonus Demografi, karena kelompok usia produktif makin banyak akan menggerakkan perekonomian daerah.

Dari data di atas dapat diketahui, bahwa penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari pada pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD), lebih sedikit. Artinya rata-rata lama mengikuti pendidikan pada masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, relatif pendek.

Sementara itu, dari sisi pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok usia terlihat, bahwa 5 (lima) besar pertumbuhan penduduk sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Halmahera Barat adalah pada penduduk dengan usia 5-9 tahun, kemudian penduduk pada usia 10-14 tahun, berikutnya penduduk usia 15-19 tahun, lalu penduduk usia 20-24 tahun dan penduduk dengan usia 25-29 tahun.

Tabel I.14
Populasi dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (jiwa) <i>Population (people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2024 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Jailolo	37.659	...
Jailolo Selatan	25.094	...
Sahu	12.560	...
Sahu Timur	11.533	...
Ibu	13.083	...
Ibu Selatan	15.824	...
Tabaru	10.107	...
Loloda	9.219	...
Loloda Tengah	4.685	...
Halmahera Barat	139.764	...

Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel I.15
Presentase dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat

Kecamatan <i>District</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk per km ² <i>Population Density per sq.km</i>
(1)	(4)	(5)
Jailolo	26,94	166,63
Jailolo Selatan	17,95	...
Sahu	8,99	102,23
Sahu Timur	8,25	42,56
Ibu	9,36	119,13
Ibu Selatan	11,32	42,96
Tabaru	7,23	45,81
Loloda	6,60	...
Loloda Tengah	3,35	...
Halmahera Barat	100,00	62,42

Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka, Tahun 2024

3. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2023 susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan dan SDA
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 1. Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2. Bagian Hukum dan Organisasi
 - c. Asisten Administrasi Umum
 - 1. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan
- Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;
- Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.
- Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Lingkungan Hidup;

- 5) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 8) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM;
- 10) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 12) Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 14) Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian;
- 15) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;

- 16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Badan Daerah terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan diklat;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana di daerah;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- Kecamatan, yang terdiri dari 9 kecamatan dan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan, antara lain:
 - 1) Kecamatan Jailolo dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Jailolo Selatan dengan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Sahu dengan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Sahu Timur dengan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Ibu dengan Tipe A;
 - 6) Kecamatan Ibu Selatan dengan Tipe A;
 - 7) Kecamatan Tabaru dengan Tipe A;
 - 8) Kecamatan Loloda dengan Tipe A;
 - 9) Kecamatan Loloda Tengah dengan Tipe A;

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli. Staf Ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli dimaksud antara lain:

- 1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
- 2) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
- 3) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan data SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) Tahun 2024 sebanyak 3.278 orang, sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak berjumlah 832 orang. Berikut Tabel Jumlah ASN berdasarkan golongan dan jenis kelamin sebagai berikut:

TABEL I.16
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan, Jenis kelamin
di Kabupaten Halmahera Barat

Jabatan	2024		
	laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Fungsional Tertentu	664	1351	2015
Fungsional Umum/Staf	482	346	828
Fungsional Penyetaraan	75	65	140
Struktural			
Eselon V	0	0	0
Eselon IV	105	33	138
Eselon III	74	56	130
Eselon II	19	8	27
Eselon I	0	0	0
Jumlah	1419	1859	3278

TABEL I.17
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat

Tingkat Pendidikan	2024		
	laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD	1	0	1
SMP/Sederajat	10	3	13
SMA/ Sederajat	398	265	663
Diploma I,II/akta,I,II	78	136	214
Diploma III/Akta III/Sarjan Muda	67	283	350

Tingkat Sarjana/Doktor/PhD	866	1171	2037
Jumlah	1420	1858	3278

TABEL I.18
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat

Pangkat/Golongan/Ruang (1)	2024		
	laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Golongan I			
1. I A (Juru Muda)	0	0	0
2. I/B (Juru Muda Tk. I)	0	0	0
3. I/C (Juru)	2	1	3
4. I/D (Juru Tingkat)	1	0	1
Golongan II			
5. II/A (Pengatur Muda)	17	8	25
6. II/B (Pengatur Muda Tk.I)	52	49	101
7. II/C (Pengatur)	103	100	203
7. II/D (Pengatur Tk.I)	105	90	195
Golongan III			
8. III/A (Penata Muda)	219	292	511
9. III/B (Penata Muda Tk.I)	224	360	584
10. III/C (Penata)	167	285	452
11. III/D (Penata Tk. I)	271	428	699
Golongan IV			
12. IV/A (Pembina)	158	165	323

13. IV/B (Pembina TK I)	90	72	162
14. IV/C (Pembina Muda)	10	9	19
15. IV/D (Pembina Madya)	0	0	0
16. IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
Jumlah	1419	1859	3278

Sumber Data : BKD Kab. Halbar Tahun 2024

TABEL I.19

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Barat

Jabatan <i>Occupation</i>	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja <i>State Employees with Employment Agreements</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(5)	(6)	(7)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama <i>Senior Executives</i>	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya <i>Middle Executives</i>	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama <i>Junior Executives</i>	-	-	-
Administrator/Administrator	-	-	-
Pengawas/Supervisor	-	-	-
Eselon V/5 th Echelon	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen <i>Certain Functional Position for Lecturer</i>	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru <i>Certain Functional Position for Teacher</i>	93	389	482
Jabatan Fungsional Medis <i>Certain Functional Position for Medical Field</i>	32	298	330
Jabatan Fungsional Teknis <i>Certain Functional Position for Technical Field</i>	2	8	10
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana <i>General Functional Position</i>	9	1	10
Jumlah/Total	136	696	832

Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka, Tahun 2024

TABEL I.20
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak
Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Halmahera Barat

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I	-	-	-
II	-	-	-
III	-	-	-
IV	-	-	-
V	4	6	10
VI	-	-	-
VII	-	-	-
VIII	-	-	-
IX	108	446	554
X	9	43	52
XI	-	-	-
XII	17	199	216
XIII	-	-	-
XIV	-	-	-
XV	-	-	-
XVI	-	-	-
XVII	-	-	-
Jumlah/Total	138	694	832

Sumber data: BPS, Halbar Dalam Angka, Tahun 2024

5 Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain itu instrument penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk setiap perangkat daerah sebagaimana dalam table di bawah ini:

Tabel I.21
Sarana dan Prasarana

NO	NAMA OPD	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI	KET
1	SEKRETARIAT DAERAH	3.442	47.737.072.479,00	

2	SEKRETARIAT DPRD	1.425	13.222.391.575,00	
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.327	56.824.502.195,79	
4	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	6.951	145.549.095.067,00	
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	251	6.774.529.628,00	
6	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	537	12.688.213.838,35	
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	91	1.406.984.806,00	
8	DINAS PERHUBUNGAN	907	9.715.750.337,00	
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	352	8.065.393.491,00	
10	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	367	3.113.473.121,00	
11	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	444	8.921.136.834,00	
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	67	332.385.180,00	
13	DPMPD	148	734.775.000,00	
14	DPMPSTP	161	965.891.744,00	
15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	989	7.730.016.326,00	
16	DINAS SOSIAL DAN P3A	228	1.428.067.025,00	
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	232	4.276.748.998,00	
18	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	97	1.054.247.070,00	
19	INSPEKTORAT DAERAH	243	2.237.272.841,00	
20	SATPOL PP DAN DAMKAR	336	3.951.479.617,00	
21	RSUD JAILOLO	2.763	124.257.415.155,75	
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	141	870.849.721,75	
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	198	3.294.659.125,00	
24	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	360	2.487.891.981,00	
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	232	1.476.229.064,00	
26	BADAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH	987	12.708.775.510,20	
27	BADAN PENDAPATAN	62	999.475.064,74	

	DAERAH			
28	KECAMATAN JAILOLO	44	369.891.000,00	
29	KECAMATAN JAILOLO SELATAN	64	452.630.250,00	
30	KECAMATAN SAHU TIMUR	46	348.068.300,00	
31	KECAMATAN SAHU	30	351.892.000,00	
32	KECAMATAN IBU SELATAN	30	402.280.000,00	
33	KECAMATAN IBU	48	456.030.225,00	
34	KECAMATAN TABARU	28	320.325.000,00	
35	KECAMATAN LOLODA	37	355.450.000,00	
36	KECAMATAN LOLODA TENGAH	17	67.350.000,00	

Sumber Data : BKAD Kab. Halbar Tahun 2024

Dari data sarana dan prasarana yang ada pada Kabupaten Halmahera Barat di atas dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja sudah cukup memadai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

6. Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan kelima kondisi Kabupaten Halmahera Barat tersebut maka sudah terakomodir kedalam RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 –2026 yang merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik ditingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupaten Halmahera Barat berawal dari isu strategis sebagai berikut :

1. Belum efektifnya pencegahan dan penanggulangan kemiskinan.
2. Belum optimalnya penguatan ketahanan pangan daerah.
3. Belum optimalnya penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.

4. Belum optimalnya penguatan akses dan mutu pelayanan pendidikan di seluruh wilayah.
5. Belum optimalnya penguatan pencegahan dan perlindungan perempuan dan khusus anak.
6. Belum optimalnya penguatan akses dan mutu pelayanan air minum dan sanitasi seluruh wilayah.
7. Belum optimalnya kualitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
8. Masih lambatnya transformasi structural melalui modernisasi pertanian, industrialisasi, dan pemanfaatan sumber pertumbuhan baru.
9. Masih lemahnya daya saing koperasi, UMKM dan kewirausahaan.
10. Masih lemahnya daya saing pariwisata dan pengelolaan keragaman wisata.
11. Masih kurangnya pengembangan keahlian tenaga kerja kearah industri dengan kompleksitas dan nilai tambah tinggi.
12. Belum meratanya jangkauan *mobile broad band* di seluruh wilayah.
13. Belum optimalnya pengurangan kesenjangan pembangun antar wilayah.
14. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, serta perwujudan kota tanpa kumuh.
15. Belum optimalnya upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif.
16. Masih belum optimalnya pembangunan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim.
17. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah.
18. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah (khususnya daerah tetangga) untuk mengakselerasi pembangunan daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Barat, yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera”

Makna kata Aman, Adil dan Sejahtera yang terkandung dalam Visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

Aman: suatu kondisi terciptanya ketenangan, kenyamanan, kedamaian, serta kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dengan berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal. Halmahera Barat yang aman menggambarkan perwujudan kepemilikan perasaan aman dan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah daerah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermartabat dalam seluruh aspek kehidupannya.

Adil: suatu kondisi terciptanya keseimbangan dan kesetaraan dalam seluruh aspek pembangunan di wilayah kabupaten Halmahera Barat. Keadilan dalam pembangunan Kabupaten Halmahera Barat senantiasa didasarkan pada keadilan komutatif yang berorientasi pada pemerataan, dengan tetap memperhatikan keadilan distributif yang menjamin keadilan diberikan berdasarkan kebutuhan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat, serta satuan wilayah maupun kawasan-kawasan wilayah pengembangan.

Sejahtera: Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Halmahera Barat yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani, rohani serta interaksi sosialnya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban



manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Halmahera Barat.

2. MISI

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disusun agar tidak terjadi multitafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Berdasarkan perspektif tersebut, maka dalam rangka mewujudkan **“Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera”** sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Halmahera Barat 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal;
2. Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya;
4. Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah tersebut diuraikan sebagai berikut:



Misi-1: Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Halmahera Barat adalah bagian dari proses dan tujuan serta merupakan satu kesatuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Kabupaten Halmahera Barat menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang telah lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan, mengharuskan dikembangkan konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan, salah satu titik berat pembangunan diletakkan pada kualitas sumber daya manusia.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan masyarakat Halmahera Barat yang unggul secara fisik, juga sebagai insan dengan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah kepribadian dan kejujuran. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, sejumlah prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM yang perlu diperhatikan antara lain, sistem pendidikan dan kesehatan yang baik dan bermutu, didukung lingkungan keluarga dan masyarakat, serta peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*).

Misi-2: Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah.

Pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat masih dihadapkan dengan kondisi ketimpangan wilayah. Salah satunya disebabkan oleh pemenuhan infrastruktur yang belum memadai di setiap wilayah, baik kecamatan maupun desa. Infrastruktur secara harfiah merupakan



akumulasi komponen fisik meliputi transportasi, pengairan drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dasar, sosial, maupun ekonomi yang tercakup dalam sistem fisik. Ketersediaan infrastruktur yang minim seringkali menjadi penyebab utama mahalnya ongkos logistik di daerah dan rendahnya arus investasi yang masuk.

Oleh karena itu, pembangunan Infrastruktur salah satu menjadi fokus utama pembangunan Halmahera Barat lima tahun kedepan. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan merata akan mendorong dan menunjang perkembangan ekonomi dan keterbukaan wilayah, yang menjamin keterjalanan antara sistem lingkungan, sosial, dan ekonomi wilayah. Sejatinya, pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik, meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar (*human needs*) rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan. Oleh karena itu misi pembangunan yang kedua ini menitik beratkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sebagai paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan. Pembangunan infrastruktur di Halmahera Barat dalam lima tahun berfokus pada infrastruktur yang andal, aman dan cerdas (*resilient*), ramah lingkungan, memenuhi kebutuhan manusia, serta berkelanjutan secara pembiayaan.

Misi-3: Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dengan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama dalam kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Upaya membangun kemandirian ekonomi daerah Halmahera Barat lima tahun ke depan difokuskan pada



menumbuhkan ekonomi pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah. Potensi ekonomi unggulan yang ada di setiap wilayah perlu digali dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menunjang pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengembangan ekonomi di setiap satuan wilayah atau kawasan-kawasan wilayah pengembangan disesuaikan dengan karakteristik dari sektor-sektor potensial unggulannya, baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya.

Misi-4: Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat.

Pada dasarnya, hidup di dalam sistem sosial yang baik dan bersih merupakan aspirasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang baik berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Sedangkan sistem yang bersih adalah, implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan-tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya.

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



Secara internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik, yakni makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Secara eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-Government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin deras arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (*digital divide*). Perubahan-perubahan ini, tentunya membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan.

Dari visi dan misi di atas, kemudian implementasikan dalam Janji Kerja yang merupakan komitmen-komitmen kampanye Bupati/Wakil Bupati Terpilih untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Janji kerja ini pada hakikatnya merupakan Prioritas Program/Kegiatan Unggulan Daerah sebagai bentuk pendukung langsung terhadap upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026. Janji Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat terpilih sebagai Prioritas Unggulan Daerah dimaksud terdiri dari 9 (sembilan) langkah aksi, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.

**Gambar II.1****Kerangka Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Kesembilan langkah aksi tersebut terangkum dalam sebuah semboyan **“Diahi Halbar”**, yang bermakna “memperbaiki, dan mengakselerasi pembangunan di Halmahera Barat”, yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Halbar Pintar

- a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar yang berkualitas diseluruh desa;
- b) Menjamin keberlanjutan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar bagi seluruh anak;
- c) Memberikan fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Halmahera Barat;

2. Halbar Sehat

- a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem kesehatan yang berkualitas, mulai dari Poliklinik Desa, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- b) Memperluas jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tidak mampu;



3. Halbar Religius

- a) Memperkuat peran rumah ibadah dan pusat-pusat keagamaan sebagai wadah pendidikan moral dan akhlak berkelanjutan bagi masyarakat;
- b) Memfasilitasi pemberian insentif bagi para pemimpin-pemimpin keagamaan di desa;

4. Halbar Lancar

- a) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sistem transportasi dan logistik diseluruh wilayah;
- b) Memfasilitasi penyediaan subsidi bagi simpul-simpul transportasi wilayah yang belum ekonomis;

5. Halbar Terang

- a) Meningkatkan aksesibilitas ketenaga listrikan di seluruh wilayah dengan mengutamakan pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (EBT);
- b) Memfasilitasi penyambungan listrik bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu;

6. Halbar Berdering

- a) Meningkatkan aksesibilitas fasilitas telekomunikasi seluler dan pita lebar di seluruh wilayah untuk mengakselerasi kapasitas literasi digital masyarakat;

7. Halbar Nyaman

- a) Meningkatkan fasilitasi penanganan rumah kumuh dan lingkungan kumuh, baik di perkotaan maupun diperdesaan;
- b) Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur pencegah dan pengendali bencana di wilayah-wilayah rawan bencana, termasuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim;

8. Halbar Tumbuh

- a) Mengembangkan sentra-sentra industri rakyat berbasis klaster sesuai potensi unggulan setempat yang disertai penyediaan fasilitasi akses kepada pasar.
- b) Membangun lumbung-lumbung pangan terpadu (pertanian, peternakandan perikanan) untuk meningkatkan



kesejahteraan petani/nelayan dan ketahanan pangan masyarakat.

- c) Membangun dan merevitalisasi destinasi-destinasi wisata bahari, wisata alam dan agrowisata;

9. Halbar Inovatif

- a) Mengembangkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efeasien, tepat fungsi dan struktur;
- b) Memaksimalkan satu data dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- c) Memaksimalkan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah;
- d) Mengefektifkan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal yang disyaratkan;
- e) Mengefektifkan sistem penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) untuk mendorong inovasi berkelanjutan bagi seluruh Aparatur pemerintahan daerah.
- f) Mengakselerasi implementasi Smart City dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke berbagai perangkat untuk mengoptimalkan efisiensi operasi dan layanan pemerintah daerah, serta terhubung dengan warga.

B. TUJUAN, SASARAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran-sasaran strategis. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program perangkat daerah.

Dari perspektif tersebut maka pelaksanaan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:



TUJUAN 1 –Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender, dengan sasaran:

Sasaran 1– Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

Sasaran 2 –Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat;

Sasaran 3 –Meningkatnya produktifitas masyarakat;

Sasaran 4 –Meningkatnya harmoni dan daya rekat sosial masyarakat;

Sasaran 5 –Meningkatnya kesetaraan gender;

TUJUAN 2– Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata, dengan sasaran:

Sasaran 6 –Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau;

Sasaran 7 –Meningkatnya konektifitas dan keterbukaan wilayah;

TUJUAN 3 –Mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan serta adaptif bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran:

Sasaran 8 –Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim;

TUJUAN 4 –Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui pemanfaatan secara optimal sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata, serta sumber daya alam strategis lainnya,dengan sasaran:

Sasaran 9– Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak;

Sasaran 10 – Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkeadilan;

TUJUAN 5 – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis dan melayani berbasis inovasi berkelanjutan, dengan sasaran:

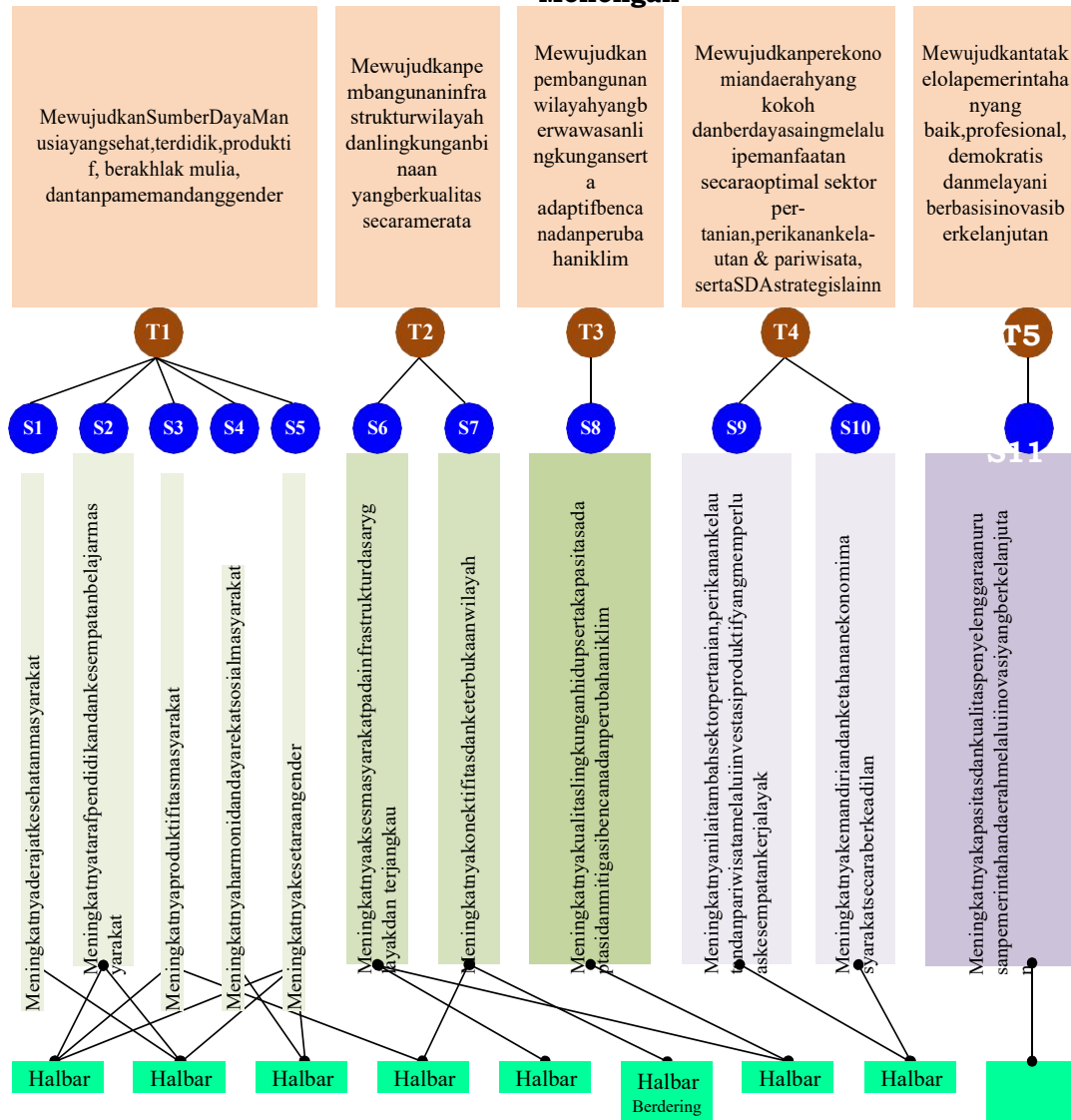
Sasaran 11 –Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui inovasi yang berkelanjutan.

Gambar berikut menyajikan keterkaitan antara janji kerja Bupati dan WakilBupati terpilih dengan tujuan dan sasaran dalam rangka

pelaksanaan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026.

Gambar II.2

**Kerangka Hubungan Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka
Menengah**



C. PERJANJIAN KINERJA

Dari paparan diatas sebagaimana ringkasan/ihtisar RPJMD Kab. Halmahera Barat dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2021-2026 yang disinkronisasikan dengan Visi dan Misi Bupati Halmahera Barat dalam dokumen jangka menengah, namun untuk menarik data sasaran dan indicator tersebut di tetapkannya Peraturan Bupati Halmahera Barat Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2023, yang direpresentasikan tiap tahunnya dalam bentuk Perjanjian kinerja Bupati Halmahera Barat, Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT JAILOLO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JAMES UANG, S.Pd. MM**
Jabatan : Bupati Halmahera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jailolo, 02 Januari 2024
BUPATI HALMAHERA BARAT,
JAMES UANG, S.Pd., MM



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Misi 1	Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal		
1		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	7,81
2		Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,70 14,00
	Misi 2	Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;		
3		Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	71,57
	Misi 3	Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya		
4		Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen) 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 3. Lama tinggal Wisatawan Mancanegara 4. Lama tinggal Wisatawan Nusantara	500 15.000 2 3,5
5		Menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,53%
	Misi 4	Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat		
6		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
7		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B

Jailolo, 03 Januari 2025
BUPATI HALMAHERA BARAT,
JAMES UANG, S.Pd., MM





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah.

Dengan mengacu pada regulasi tersebut, metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja tetap menggunakan metode perbandingan capaian kinerja. Metode perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai setiap organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis baik terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) maupun terhadap keberhasilan capaian dan beberapa tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan deskripsi kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tahapan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran dimulai dari pengukuran kinerja yang telah rencanakan sebelumnya, kemudian atas rumusan capaian kinerja tersebut maka dilakukan analisis keterkaitan antara sasaran yang ingin dicapai dengan indikator yang termuat pada setiap sasaran.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sasaran dengan membandingkan antara indikator yang telah dicapai dan yang belum mencapai target. Dengan demikian dalam uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini hanya menguraikan gambaran umum capaian kinerja dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

85-100	= Sangat Baik,
70-84	= Baik
50 – 69	= Cukup Baik
< 49	= Kurang Baik



- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = X 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} = X 100 \%$$

Analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah. Hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 tidak lepas dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021– 2026 yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan lainnya yaitu :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2026.
3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 2 Januari Tahun 2024.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Halmahera Barat Maluku Utara yang dijabarkan dalam sasaran dan indikator kinerja yang terukur, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai pencerminan dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat 2021 – 2026 maka analisis capaian



kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

MISI PERTAMA : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN BERAKHLAK MULIA BERLANDASKAN KESETARAAN SERTA NILAI-NILAI LUHUR AGAMA, PANCASILA DAN KEARIFAN LOKAL

Dimana untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 ditetapkan 4 Misi dan 7 Sasaran sebagaimana yang termaktub dalam rincian pembahasan komprehensif sebagai berikut :

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal;
2. Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya; dan
4. Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat

Program prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024 mengacu pada Visi dan Misi sebagaimana yang terimplementasikan dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat, serta dalam rangka untuk mendukung prioritas program nasional dan prioritas program provinsi maluku utara. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan cakupan ini diukur melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024. Adapun Sasaran Dari Tujuan tersebut dalam Misi Pertama sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Kinerja Bupati Halmahera Barat di tahun 2024 adalah :



Sasaran Ke 1

Sasaran Ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender

Tabel : III.1

No	Sasaran	indikator	Target
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	66,81

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPM digunakan sebagai proxy untuk mengukur keberhasilan Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender. Disebut proxy karena dari tiga dimensi yang membentuk IPM, terdapat dua dimensi yang memiliki relevansi langsung terhadap substansi pada misi pembangunan yang pertama, yaitu Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Adapun dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan tidak digunakan sebagai indikator dalam sasaran-sasaran pada Tujuan 1, tetapi akan diproxikan oleh indikator Pertumbuhan Produktivitas Total Daerah. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks pengeluaran (standar hidup layak). Adapun rumus formula IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Kesehatan} \times I_{Kesehatan}} \times 100$$

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel: III.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	66,81	69,20

Dari Sasaran Pertama Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam Perjanjian kinerja Bupati Halmahera Barat mencapai target yang diperjanjikan dari target **66,81** mencapai target **69,20** Dalam artian apa yang diharapkan lebih mencapai target yang diperjanjikan.



b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Adapun perbandingan antara tahun ini dan tahun lalu adalah sebagaimana uraian pada tabel dibawah :

Tabel: III.3

No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender						Indeks Pembangunan Manusia	66,81	69,20	104%
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian		Realisasi
	2022			2023			2024			
	66,92	67,84	101%	67,73	68,56	101%	66,81	69,20		104%

Pengukuran perbandingan dalam pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa dilihat dalam perhitungan dari BPS Halmahera Barat sebagai data Pembanding sebagaimana yang termaktub dalam tabel berikut :

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2020–2024 Human Development Index by Regency/Municipality in Maluku Utara Province, 2020–2024
Tabel: III.4

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	66,96	67,20	67,84	68,56	69,20
Halmahera Tengah	67,97	68,38	68,95	69,95	70,94
Kepulauan Sula	65,72	65,99	66,90	67,49	68,19
Halmahera Selatan	65,42	65,88	66,78	67,55	68,43
Halmahera Utara	68,26	68,58	69,13	69,79	70,52
Halmahera Timur	67,47	67,70	68,62	69,48	70,35
Pulau Morotai	63,69	64,09	64,99	65,93	66,91
Pulau Taliabu	62,50	62,75	63,65	64,31	64,88
Kota Ternate	80,32	80,63	81,28	81,79	82,59
Kota Tidore Kepulauan	71,57	72,04	72,57	73,40	74,01
Nama Provinsi	69,30	69,56	70,26	70,98	71,84

Sumber Data : Bps Halmahera Barat (<https://halbarkab.bps.go.id/publikasi.html>)



c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen strategis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.5

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	100%
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
2021	2022	2023	2024
66,12	66,92	67,73	69,20
REALISASI KINERJA			
2021	2022	2023	2024
102%	101%	101%	104%

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu Indikator kesehatan (ditunjukkan dengan indeks angka harapan hidup waktu lahir), indikator pendidikan (ditunjukkan dengan indeks angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi (ditunjukkan dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan/indeks daya beli penduduk). Ketiga indikator ini dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Pada dasarnya IPM merupakan indeks yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama sebagai alat pembanding ini sejalan dengan fungsi indeks mutu hidup (IMH) atau *Physical Quality of Life Index* (PQLI) pada masa lalu. IMH disusun dari tiga komponen, yaitu: angka kematian bayi, angka harapan hidup umur satu tahun, dan angka melek huruf. Salah satu kritik mendasar terhadap IMH adalah bahwa dua komponen pertamanya kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti dibuktikan oleh kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili satu saja.

Adapun **Keberhasilan** Dalam perjanjian kinerja ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sudah mewakili beberapa



unsur IPM sebagaimana yang disebut diatas, namun melihat dari capaian kinerja Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 terkait peningkatan IPM sangatlah signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dalam artian sasaran Pertama Visi Bupati ini tercapai sesuai dengan harapan yang ditargetkan. Bukti capaian tersebut bisa dilihat pada tabel diatas dimana terdapat link tautan alamat *website* BPS Halmahera Barat untuk angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Halmahera Barat.

Adapun **kegagalan** dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Barat adalah dibidang Ekonomi yaitu daya beli masyarakat yang menurun sehingga terjadi inflasi ketidakstabilan perekonomian hal ini terjadi karena Kabupaten Halmahera Barat merupakan daerah termahal ekonominya di Indonesia dibandingkan daerah pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi belum lagi warga penduduk di wilayah Halmahera Barat rata-rata sumber mata pencarian masyarakat adalah sebagai petani dan nelayan dimana pendapatan mereka menunggu musim panen bagi petani dan musim ikan dilaut bagi nelayan untuk bisa memanfaatkan pendapatan mereka sehingga bisa terciptanya angka penurunan terhadap perekonomian masyarakat pada umumnya.

Adapun program sasaran kegiatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel: III.6

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN KESEHATAN		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 54.012.698.000
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.500.000.000
3	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Rp. 17.000.000.000
4	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Rp.1.750.000.000
5	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standa	Rp.1.000.000.000
6	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Rp.1.000.000.000
7	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Rp.3.750.000.00
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Rp.29.162.698.000



	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
9	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.250.000.000
10	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.645.000.000
11	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.250.000.000
12	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.250.000.000
13	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.100.000.000
14	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.100.000.000
15	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.100.000.000
16	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.100.000.000
17	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Rp.100.000.000
18	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Rp.100.000.000
19	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.1.000.000.000
20	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.250.000.000
21	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp.250.000.000
22	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp.250.000.000
23	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp.20.000.000.000
24	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.567.698.000
25	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Rp.750.000.000
26	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Rp.100.000.000
27	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp.350.000.000
28	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp.350.000.000
29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 250.000.000
30	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000
31	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 150.000.000
32	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Rp.100.000.000



	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
33	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Rp.100.000.000
34	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp.200.000.000
35	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.100.000.000
36	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.100.000.000
37	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.100.000.000
38	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.100.000.000
39	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp.100.000.000
40	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.100.000.000
41	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.100.000.000

Sumber data : RKPD BP3D Kab. Halmahera Barat.



Sasaran Ke 2

Sasaran Ke-2 Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat

Tabel: III.7

No	Sasaran	indikator	Target
2	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,58 13,24

IRLS adalah Indeks Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

Dimana:

RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

RLSMin = Standar UNDP (0)

RLSMax = Standar UNDP (15 tahun)

Sedangkan IHLS adalah Indeks Harapan Lama Sekolah yang dihitung dengan formula:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Max} - HLS_{Min}}$$

Dimana:

RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

RLSMin = Standar UNDP (0)

RLSMax = Standar UNDP (18 tahun)

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel: III.8

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,58 13,24	8,59 13,25	100% 100%

Dari sasaran Kedua Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam Perjanjian kinerja Bupati Halmahera Barat mencapai target yang diperjanjikan dari target rata-rata lama sekolah (Tahun) dengan target 8,58 mencapai target 8,59 Dalam artian apa yang diharapkan dalam Perjanjian Kinerja mencapai target yang diperjanjikan yakni **100 %** dari target dan realisasi sedangkan harapan lama sekolah (tahun) dari yang di perjanjian 13,24 dan mencapai target dengan nilai 13,25, hal tersebut mencapai target yang diperjanjikan **100%** indikator tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam pengukuran dan perhitungan data dari BPS Halmahera Barat sebagaimana yang termaktub dalam tabel berikut :



Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Maluku Utara
Tabel: III.9

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2022	2023	2024
Halmahera Barat	8,57	8,58	8,59
Halmahera Tengah	9,02	9,19	9,20
Kepulauan Sula	9,02	9,04	9,17
Halmahera Selatan	8,16	8,17	8,42
Halmahera Utara	8,63	8,65	8,67
Halmahera Timur	8,52	8,66	8,88
Pulau Morotai	7,42	7,55	7,73
Pulau Taliabu	7,94	7,97	7,99
Ternate	12,06	12,07	12,08
Tidore Kepulauan	9,96	9,97	10,12
Maluku Utara	9,24	9,26	9,37

Sumber data: Bps Halmahera Barat <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/rata-rata-lama-sekolah-menurut-Kabupaten-kota-tahun-.html>

Sedangkan harapan lama sekolah (tahun) bisa dilihat pada tabel berikut :
Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2022-2024
Tabel: III.10

Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2022	2023	2024
Halmahera Barat	13,23	13,24	13,25
Halmahera Tengah	13,22	13,23	13,52
Kepulauan Sula	12,96	12,97	12,98
Halmahera Selatan	12,97	13,03	13,04
Halmahera Utara	13,67	13,68	13,69
Halmahera Timur	12,86	12,87	12,89
Pulau Morotai	12,97	12,99	13,02
Pulau Taliabu	12,86	12,87	12,88
Ternate	15,76	15,78	15,92
Tidore Kepulauan	14,36	14,48	14,49
Maluku Utara	13,73	13,74	13,75

Sumber data: Bps Halmahera Barat <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/rata-rata-lama-sekolah-menurut-Kabupaten-kota-tahun-.html>



b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Adapun perbandingan antara tahun ini dan tahun lalu adalah :

Tabel: III.11

No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
2	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat						1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,58	8,59	100%
							2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,24	13,25	100%
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian		Realisasi
	2022 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			2023 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			2024 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
	8,57	8,57	100%	8,58	8,58	100%	8,58	8,59		100%

	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
	2022 Harapan Lama Sekolah (Tahun)		2023 Harapan Lama Sekolah (Tahun)		2024 Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	13,23	13,23	100%	13,24	13,24	100%	13,24	13,25	100%

Adapun pencapaian kinerja antara tahun ini dengan beberapa tahun yang lalu dapat dilihat dari tabel data BPS Halmahera Barat sebagai berikut:

Rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota Maluku Utara

Tabel: III.12

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2022	2023	2024
Halmahera Barat	8,57	8,58	8,59
Halmahera Tengah	9,02	9,19	9,20
Kepulauan Sula	9,02	9,04	9,17
Halmahera Selatan	8,16	8,17	8,42
Halmahera Utara	8,63	8,65	8,67
Halmahera Timur	8,52	8,66	8,88
Pulau Morotai	7,42	7,55	7,73
Pulau Taliabu	7,94	7,97	7,99
Ternate	12,06	12,07	12,08
Tidore Kepulauan	9,96	9,97	10,12
Maluku Utara	9,24	9,26	9,37

sumber data: Bps Halmahera Barat <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/rata-rata-lama-sekolah-menurut-Kabupaten-kota-tahun-.html>



Sedangkan harapan lama sekolah (tahun) bisa dilihat pada tabel berikut :

Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2021-2023

Tabel: III.13

Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2021	2022	2023
Halmahera Barat	13,20	13,23	13,24
Halmahera Tengah	13,11	13,22	13,23
Kepulauan Sula	12,77	12,96	12,97
Halmahera Selatan	12,79	12,97	13,03
Halmahera Utara	13,61	13,67	13,68
Halmahera Timur	12,76	12,86	12,87
Pulau Morotai	12,93	12,97	12,99
Pulau Taliabu	12,65	12,86	12,87
Ternate	15,75	15,76	15,78
Tidore Kepulauan	14,32	14,36	14,48
Maluku Utara	13,68	13,73	13,74

sumber data: Bps Halmahera Barat (<https://malut.bps.go.id/indicator/26/261/1/harapan-lama-sekolah-menurut-Kabupaten-kota-tahun-.html>)

d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen strategis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.14

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
2	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	100%
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
	2022	2023	2024
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	8,49	8,60	8,72
	REALISASI KINERJA		
	2022	2023	2024
	101%	100%	99%
	2022	2023	2024
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	13,67	13,83	13,99
	REALISASI KINERJA		
	2022	2023	2024
	96%	97%	95%

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

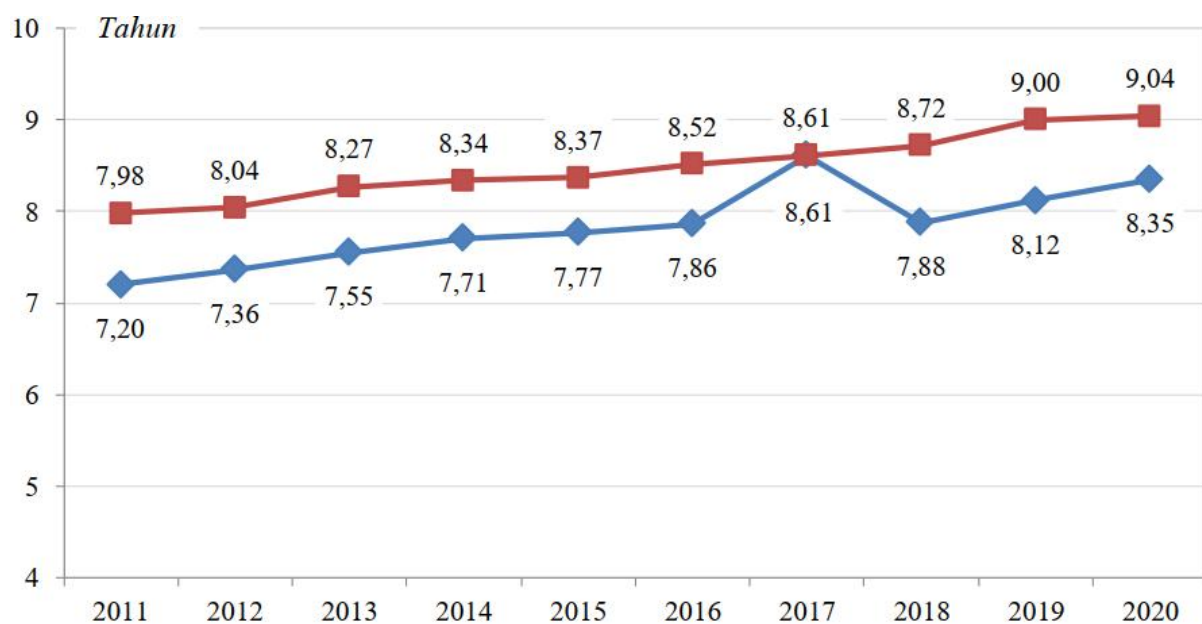


e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 untuk penduduk yang tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Seiring dengan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun. Angka RLS Kabupaten Halmahera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2011 sehingga mencapai angka tertingginya 8,35 tahun di tahun 2020.

Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 telah menempuh pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II). Tren kenaikan ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas dan daya saing sumber daya manusia Halmahera Barat yang lebih baik. Namun demikian, sebagaimana grafik dalam Gambar capaian RLS Kabupaten Halmahera Barat masih tetap konsisten berada di bawah RLS provinsi Maluku Utara dalam 10 tahun terakhir.

Grafik: III.1



Sumber data BPS. Kab. Halmahera barat

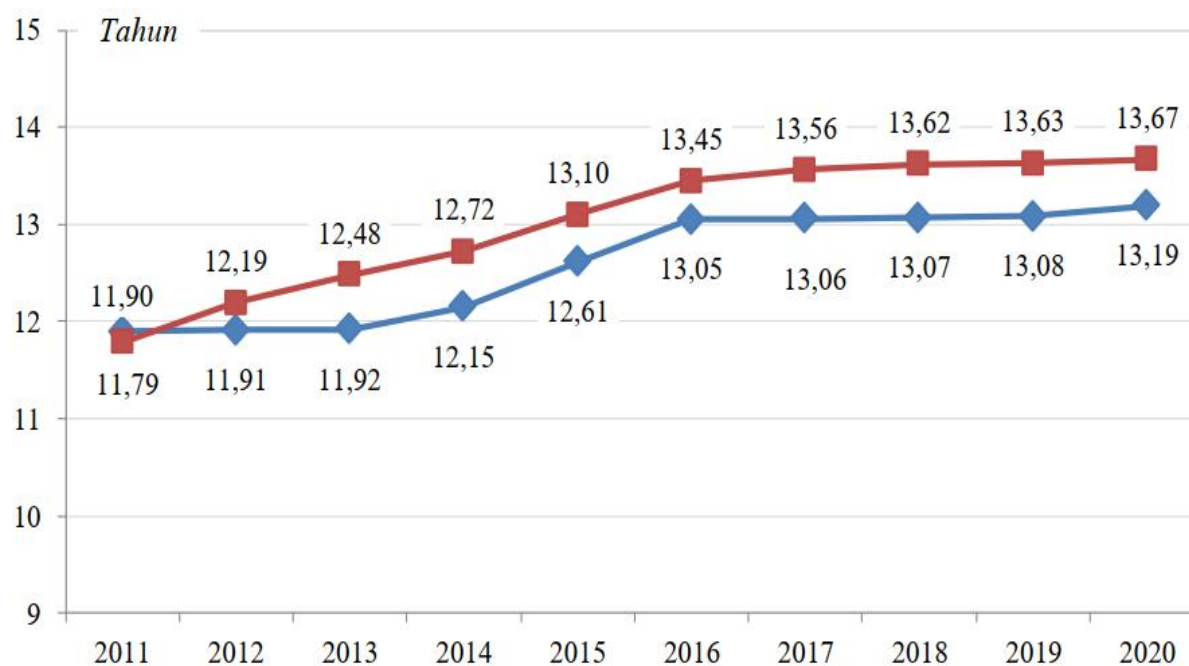
Selain rata-rata lama sekolah, komponen lain dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah. Harapan Lama



Sekolah (HLS) mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal, yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh seorang anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berdasarkan definisi tersebut, pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Halmahera Barat usia tertentu (>7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat setara Diploma I. Hal ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 13,19 tahun 13 tahun.

Namun demikian, sebagaimana tersaji dalam Gambar angka HLS Kabupaten Halmahera Barat masih konsisten berada di bawah rata-rata provinsi Maluku Utara dalam sembilan tahun terakhir:

Grafik :III.2



Sumber data : BPS. Kab. Halmahera Barat.

Salah satu komponen dimensi pengetahuan yang sudah tidak diperhitungkan sebagai pembentuk IPM berdasarkan metode baru, masih relevan untuk didiskusikan adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Penduduk yang bisa membaca dan menulis memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Berdasarkan definisinya, Angka Melek Huruf menggambarkan



jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 telah mencapai 98,70 persen atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 98,06 persen. Namun capaian di tahun 2020 ini masih lebih rendah dari Angka Melek Huruf pada rata-rata provinsi yang sudah mencapai 98,77 persen.

Adapun **Keberhasilan** Tahun **2024** ini angka Dari sasaran Kedua Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam Perjanjian kinerja Bupati Halmahera Barat mencapai target yang diperjanjikan dari target rata-rata lama sekolah (Tahun) dengan target **8,58** mencapai target **8,59** Dalam artian apa yang diharapkan dalam Perjanjian Kinerja mencapai target yang diperjanjikan yakni **100 %** dari target dan realisasi sedangkan harapan lama sekolah (tahun) dari yang di perjanjian **13,24** dan mencapai target dengan nilai **13,25**, hal tersebut mencapai target yang diperjanjikan **100%** indikator tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam pengukuran dan perhitungan data dari BPS Halmahera Barat sebagaimana tabel diatas.

Adapun **keberhasilan** sebagai berikut:

- 1) Sejak Tahun 2010 hingga ditahun 2024 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memprioritaskan CPNSD bagi Pelamar guru yang ditempatkan seluruh kecamatan yang ada di Halmahera Barat, begitu juga dengan di tahun 2024 Bupati Halmahera Barat mengambil Kebijakan untuk mengangkat Tenaga Honorer Guru menjadi Pegawai Perjanjian Kontrak P3K yang akan segera dilantik menunggu Serat Keputusan Dari Instansi Pusat/BKN RI;
- 2) Setiap Tahun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membangun dan merehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dan membangun sekolah baru jika terjadi kerusakan berat hal tersebut bisa dilihat dari Anggaran Pembangunan Sekolah pada daftar terampir;

Adapun **kegagalan** Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, maka beberapa permasalahan perlu untuk segera di selesaikan antara lain:

- 1) Anggaran adalah salah satu fak tor penunjang peningkatan kinerja, keterlambatan pada tahapan pencairan masih dialami sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan tidak optimal;



- 2) Belum optimalnya pendidikan karakter bangsa dapat dilihat dari rata – rata lama sekolah yang meningkat dari tahun sebelumnya tapi masih berada di bawah provinsi dan beberapa kab/Kota yang ada di Maluku utara.
- 3) Belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan ini dapat dilihat dari angka APS, APK dan APM yang masih Fluktuasi dalam 4 Tahun Terakhir
- 4) Berdasarkan PERMENDIKBUD No 22 Tahun 2016 maka dapat disampaikan bahwa untuk rombongan belajar SD dan SMP masih berada di bawa ketentuan maksimum yaitu SD 28 dan SMP 32.

Dari deskripsi gambaran tersebut diatas bahwa dalam Sasaran kedua **“Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat”** Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Mencapai tahapan dalam yang ditargetkan dalam kinerja untuk prioritas perkembangan didunia pendidikan.

Adapun program sasaran kegiatan Meningkatkan taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel: III.15

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN PENDIDIKAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RP. 140.975.590.869
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 101.495.875.403
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 39.079.715.466
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 400.000.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 300.000.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Rp. 100.000.000
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 50.000.000

Sumber data : RKPD BP3D Kab. Halmahera Barat.



MISI KEDUA : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENGAKSELERASI KETERBUKAAN DAN DAYA SAING WILAYAH;

Sasaran Ke 3

Sasaran Ke-3 Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata.

Tabel: III.16

Sasaran Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata

No	Sasaran	indikator	Target
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,57

Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur penunjang konektifitas wilayah di Halmahera Barat. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) dihitung menggunakan formula:

$$IPI = \left(\sqrt[3]{IID \times IW} \right) \times 100$$

Dimana :

IID = Indeks Infrastruktur Dasar

IW = Indeks Infrastruktur Wilayah.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran 7 mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata adalah sebagai tabel berikut:

Tabel: III.17

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,57	78,28%

Dalam capaian sasaran kinerja Ke_3 yakni “**Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata**” dengan indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur dalam hal ini bupati Halmahera Barat dalam Perjanjiannya adalah membangun jalan sebagai penghubung antara wilayah guna untuk kemudahan akses bagi masyarakat dan



pengguna jalan pada umumnya, dari progres perencanaan bupati terhadap pemantapan jalan yang direncanakan yaitu dengan target **70,57%** luas infrastruktur jalan, dalam capaian tersebut progres yang dicapai adalah **78,28%** dalam artinya bahwa bupati mampu mempertanggungjawabkannya kinerjanya sesuai PK yang di janjikan dan bahkan kinerja tersebut melebihi target yang ditentukan, pada cakupan ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berhak mendapatkan predikat baik atas progres kinerja yang melebihi target. Adapun bukti dokumentasi yang disajikan sebagai berikut :

Gambar: III.1

Gambar pada Lokasi jalan Sebelum pengaspalan





Gambar : III.2





Gambar : III.3





Gambar : III.4



Gambar : 5





28 Oktober 2024
1,0735N 127,4662E
Kabupaten Halmahera Barat
PENKTN JALAN TANAH KE ASPAL (HOTMIX)RUAS HOKU-HOKU PAYO
Kegiatan : -
Segmen : 1
Sta : 0 + 350
Fisik : 100%

Gambar : 7



28 Oktober 2024
1,0742N 127,4664E
Kabupaten Halmahera Barat
PENKTN JALAN TANAH KE ASPAL (HOTMIX)RUAS HOKU-HOKU PAYO
Kegiatan : -
Segmen : 1
Sta : 0 + 275
Fisik : 100%



b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel: III.18

No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata						Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,57	78,28	111%
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian		Realisasi
	2022			2023			2024			
	56,02	55,97	100%	62,57	62,97	101%	70,57	78,28		101%

c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen stragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.19

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	100%
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
	2022	2023	2024
	59,17	62,57	67,52
REALISASI KINERJA			
	2022	2023	2024
	100%	101%	116%

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

f) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Halmahera Barat merupakan daerah kepulauan yang terletak diwilayah Provinsi Maluku utara, lintas pusat kota di Ternate menuju ke Halmahera Barat bisa di tempuh dengan jalur perhubungan laut, namun Kabupaten Halmahera Barat sendiri merupakan 1 (satu) daratan dengan ibu kota Provinsi dan Kabupaten lainnya seperti, Halmahera Timur, Utara, Tengah dan Selatan. Namun pulau Halmahera merupakan daerah pergunungan dan masih alamiah kondisi alamnya, hingga saat ini untuk menuju akses ke berbagai lintas Kabupaten/kota diperlukan proses pemantapan jalan dan aspal yang memadai.

Indeks Pembangunan Infrastruktur khususnya pembangunan jalan memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang



akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Infrastruktur Pembangunan jalan sepertinya menjadi jawaban dari setiap kebutuhan bagi negara yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi, untuk dapat membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Problemnya terhadap kegagalan dalam pembuatan jalan adalah pembangunan infrastruktur membutuhkan modal besar yang signifikan, yang sering tidak selalu diikuti oleh loncatan perolehan nilai tambahnya (*value added*).

Faktor keberhasilan terhadap Indeks Pembangunan Infrastruktur terhadap jalan yakni ;

- 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mendukung sehingga bisa direpresentasikan pagu tersebut untuk kepentingan umum;
- 2) Memiliki studi kelayakan yang memadai;
- 3) Memiliki tarif/pendapatan yang sesuai kontrak kerja sama;
- 4) Memiliki alokasi risiko yang tepat

Faktor gagal karena berbagai faktor yakni karena ;

1. Perencanaan yang buruk, pemilihan kontraktor yang salah, dan faktor lingkungan.;
2. Faktor perencanaan Tergesa-gesa dalam perencanaan, Kurang kajian dan koordinasi, Tidak mengikuti Kerangka Acuan Kerja (TOR), Kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik.;
3. Faktor pemilihan kontraktor Memilih kontraktor yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman;
4. Faktor lingkungan Tanah tidak stabil Ketinggian air tanah rendah Ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor;
5. Faktor Manajemen proyek yang tidak cermat dan tidak terkoordinasi, Kurangnya peran serta pengguna jasa, Kurangnya komitmen manajemen pada pelaksana proyek, Kurangnya penetapan tujuan yang jelas.

Dalam indikator Indeks pembangunan Infrastruktur khususnya pembuatan jalan Bupati Halmahera Barat merepresentasikan perjanjian kerjanya untuk tahun 2024 untuk memprioritaskan terhadap pemantapan jalan lingkup Halmahera Barat, walaupun dari segi biaya yang sangat besar namun sangat berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan infrastruktur di Halmahera barat ditahun 2024 melebihi target baik dalam Perjanjian Kinerja maupun target dalam dokumen perencanaan RPJMD Kab. Halmahera barat tahun 2021-2026.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target Indek Infrastruktur Khususnya Pembuatan Jalan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel: III.20

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	ROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	RP. 63,000,000,



MISI KETIGA : MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH DENGAN MENSINERGIKAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN,

Sasaran Ke 4

Sasaran Ke-4 :Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak

Tabel: III.21

No	Sasaran	indikator	Target
4	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen)	17,43

Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata dihitung menggunakan formula:

$$PNT_{Pr} = \left(\frac{PDRBP_{r_t} - PDRBP_{r_{t-1}}}{PDRBP_{r_{t-1}}} \right) \times 100\%$$

Dimana :

PNTPr = Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata

PDRBPr = PDRB ADHK Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

t = Tahun yang ditinjau

Dalam capaian pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen) maka Sasaran Strategis yang di pergunakan untuk mencapai formula tersebut adalah :

Tabel: III.22

No	Sasaran	indikator	Target
4	Peningkatan Angka Kunjungan	1.Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	5.500
		2.Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	85.000
		3.Lama tinggal Wisatawan Mancanegara	2
		4.Lama tinggal Wisatawan Nusantara	3,5

Sasaran Strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa sasaran ini merupakan variabel penting bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam menjadi tolak ukur kinerja Bupati, mengingat pentingnya peningkatan dan



pengembangan Destinasi wisata di Kabupaten Halmahera Barat serta peningkatan promosi Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat melalui event/Festival Pariwisata yang dilakukan secara terus menerus sehingga membutuhkan dukungan Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat sebagai daya dorong pariwisata Kabupaten Halmahera Barat di kompetisi Nasional maupun Internasional.

b) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran 6 yang dapat diukur Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak, yang memprioritaskan dalam perjanjian kerja dalam sektor urusan kepariwisataan adalah sebagai tabel berikut:

Tabel: III.23

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi	Presentasi
1	Peningkatan Angka Kunjungan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	5.500	487	88,55%
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	85.000	76,071	89,495%
		Lama tinggal Wisatawan Mancanegara	2	3	150%
		Lama tinggal Wisatawan Nusantara	3,5	4	114,286%

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel: III.24

No	Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	478	5.500	9,56%	487
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	81,917	85.000	450,093%	76,071
3	Lama tinggal Wisatawan Mancanegara	3	2	150%	3
4	Lama tinggal Wisatawan Nusantara	4	3,5	114,286%	4



- d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.25

No	Sasaran	Realisasi		Target RPJMD	
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	478	487	239	483
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	81,917	76.071	9.154	11,443
3	Lama tinggal Wisatawan Mancanegara	3	3	3	3
4	Lama tinggal Wisatawan Nusantara	4	4	4	4

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

- g) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari data yang tersedia dan dari hasil analisis 4 (empat) indikator pada 1 (Satu) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 maka Capaian indikator kinerja termasuk dalam Skala Nilai Peringat Kinerja pada Interval Nilai Realisasi Kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria Penilaian **Sangat Tinggi** dimana dari 4 Indikator Kinerja yang semuanya mencapai target indikator kinerja yang telah melampaui target yang ditetapkan,

Tabel: III.26

Kunjungan wisatawan tahun 2024

JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024						
No	Bulan	Tahun N				Jumlah
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Tujuan Wisata			
			Bisnis	Berlibur	Pribadi	
1.	Januari	4627	0	4627	0	4627
2.	Februari	2652	0	2652	0	2652
3.	Maret	3096	0	3096	0	3096
4.	April	5744	0	5744	0	5744
5.	Mei	5243	0	5243	0	5243
6.	Juni	5768	0	5768	0	5768
7.	Juli	7926	0	7926	0	7926
8.	Agustus	8108	0	8108	0	8108
9.	September	8342	0	8342	0	8342
10.	Oktober	8126	0	8126	0	8126
11.	November	7177	0	7177	0	7177
12.	Desember	9262	0	9262	0	9262
Jumlah		76.071	0	76.071	0	76.071

Sumber Data : Disparpora Kabupaten Halmahera Barat

Sumber data: Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga



Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023 menurun dibanding tahun 2024 dan tidak mencapai target yang ditetapkan dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan menurunnya jumlah kunjungan wisman pada tahun 2024, karena memang faktor musiman atau low season. Katanya, penurunan kunjungan wisman secara bulanan ini mencerminkan dinamika yang mempengaruhi pariwisata internasional, namun secara tahunan tren tetap menunjukkan angka positif.

Indikator jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara pada tahun 2024 sangat tinggi dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Low season Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Justru meningkat dari tahun sebelumnya yakni jika tahun 2023 hanya mencapai 478 kunjungan sedangkan tahun 2024 mencapai 487 kunjungan yang artinya kunjungan wisatawan nusantara terbilang “Sangat Tinggi” karena mampu melampaui target yang ditetapkan di capaian sebesar **102%**

Kunjungan wisatawan tahun 2022-2023

No	Bulan	Tahun N								Jumlah
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Tujuan Wisata			Kebangasaan				
			Bisnis	Berlibur	Pribadi	Jerman	USA	Australia	dll	
1.	Januari	9	0	9	0	2	0	2	5	9
2.	Februari	21	0	21	0	11	2	4	4	21
3.	Maret	14	0	14	0	4	0	0	10	14
4.	April	18	0	18	0	2	2	4	10	18
5.	Mei	33	0	33	0	10	2	12	9	33
6.	Juni	51	0	51	0	15	2	21	13	51
7.	Juli	59	0	59	0	28	0	28	3	59
8.	Agustus	49	0	49	0	24	0	20	5	49
9.	September	42	0	42	0	16	0	18	8	42
10.	Oktober	50	0	50	0	20	2	20	8	50
11.	November	53	0	53	0	17	2	16	18	53
12.	Desember	88	0	88	0	36	0	32	20	88
Jumlah		487	0	487	0	185	12	177	113	487

Tabel: III.27

Sumber data: Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2024 naik sebesar 150% atau 3 hari dari target 2 hari yang ditetapkan sehingga terbilang berhasil meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 100% atau 2 hari dari



target 2 hari yang ditetapkan. Sehingga peningkatan dari indikator lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2024 dibanding tahun 2023 naik sebesar 150%. Peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara ini tidak terlepas dari kerja Bupati melalui Promosi Pariwisata dan Event-event yang diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat di Mata Dunia

Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara tahun 2024 meningkat dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 114,286% atau 4 hari dari target 3,5 hari yang ditetapkan dan ini artinya terjadi peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara dibanding tahun 2023 yang hanya 100% atau hanya mencapai 3,5 hari dari target 3.5 hari ditetapkan. jika dilakukan perbandingan maka kenaikan persentase tahun 2024 dibanding 2023 sebesar 114,286% kenaikan. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh beberapa Event yang diselenggarakan Oleh Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka mempromosikan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat melalui kerja sama dengan berbagai pihak Nasional maupun Internasional.

Dari data yang tersedia dan dari hasil analisis 4 (empat) indikator mencapai sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2024 maka Capaian indikator kinerja termasuk dalam Skala Nilai Peringat Kinerja pada Interval Nilai Realisasi Kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi dimana dari 4 Indikator Kinerja yang tersedia mencapai target maksimum indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun **keberhasilan** adalah karena :

1. Penerapan Protokol Kesehatan yaitu CHSE pada setiap pelaksanaan kegiatan Pariwisata maupun pada setiap DTW.
2. koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota dan Mitra Kerja
3. Membenahi satu persatu penyebab kegagalan yang ada seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dari segi rendanya kualitas SDM Kepariwisata telah dilakukan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata serta Eksplorasi daya tarik wisata semua Daerah Kabupaten/Kota.
4. Gencarnya promosi-promosi event/kegiatan pariwisata melalui media digital.

Selain dari kunci keberhasilan yang berhasil diterapkan maka adapun program/kegiatan penunjang keberhasilan yang dilakukan oleh Bupati dari



pencapaiannya tidak terlepas dari program/kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan. Tercatat terdapat beberapa kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Halmahera Barat sebagai penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Adapun Kegagalannya yakni dari faktor sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pengembangan pada potensi daya tarik wisata di berbagai daerah;
2. Kurangnya dukungan permodalan , peralatan, serta pemasaran terhadap sektor ekonomi kreatif;
3. Masih rendahnya kualitas SDM kepariwisataan;
4. Lemahnya koordinasi dan konsolidasi antar stakeholder Pariwisata;
5. Masih Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (media sosial, *influencer*, kerja sama swasta dll) dalam mempromosikan potensi wisata.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target Sasaran Peningkatan Jumlah Kunjungan dalam program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel: III.28

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 5,957,948,460
2	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 1,407,500,000
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 616,000,000



Sasaran Ke 5

Sasaran Ke-5 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Tabel: III.29

No	Sasaran	indikator	Target
5	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,29%

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini merupakan *indikator exact* yang menggambarkan keberhasilan dalam efektivitas penanggulangan kemiskinan di daerah. Tingkat kemiskinan dihitung menggunakan formula:

$$P = \frac{q}{n}$$

Dimana :

P = Persentase penduduk miskin

q = Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran 7 Menurunnya Tingkat kemiskinan adalah sebagai tabel berikut:

Tabel: III.30

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi
5	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,29%	8,74%

Dalam pencapaian indikator tingkat kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalami penurunan yang signifikan yang di targetkan penurunannya **8,29** menjadi meningkat diangka **8,74** ditahun 2024.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel: III.31

Tabel. III.01										
No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
5	Menurunnya Tingkat kemiskinan						Tingkat Kemiskina n (persen)	8,29%	8,74%	100%
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian		Realisasi
	2022			2023			2024			
	8,62	8,43	2%	8,29	8,74	5%	8,29	8,74		100%



Adapun tabel pencapaian angka kemiskinan di Halmahera barat di beberapa tahun terakhir bisa dilihat dari data BPS Halmahera Barat Sebagai Berikut:

Angka kemiskinan data BPS Halmahera Barat
Tabel: III.32

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	2023	2024
Halmahera Barat	8,74	8,75
Halmahera Tengah	11,44	10,71
Kepulauan Sula	8,17	7,96
Halmahera Selatan	5,68	5,63
Halmahera Utara	4,62	4,71
Halmahera Timur	12,47	11,91
Pulau Morotai	5,38	5,11
Pulau Taliabu	7,31	7,13
Ternate	3,39	3,14
Tidore Kepulauan	6,35	6,56
Maluku Utara	6,46	6,32

Sumber data : BPS. Kab. Halmahera Barat Tahun 204 <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk1IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-persen-.html>

c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.33

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
5	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	5%
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
	2022	2023	2024
	8,43	8,74	8,75
REALISASI KINERJA	REALISASI KINERJA		
	2022	2023	2024
	0%	0%	0%

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026



d) **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Adapun **Faktor Kegagalan** dalam menuntaskan Kemiskinan di Halmahera Barat adalah peningkatan kemiskinan itu terjadi dikarenakan ada kenaikan angka garis kemiskinan dari tahun 2023 ke 2024 yang meningkat 5 persen secara signifikan, problema tersebut terjadi karena sebagian masyarakat yang dikategori tidak miskin (hampir miskin) pada tahun 2023 setelah tahun 2024 menjadi miskin. Faktor penurunan kemiskinan adalah merupakan suatu dampak dari letusan gunung berapi di Kecamatan Ibu sehingga dana Alokasi Umum untuk diberikan kepada bantuan sosial tidak terealisasi secara optimal dalam rangka penanganan kemiskinan, program yang seyogyanya diprioritaskan seperti program kemiskinan ekstrim tidak dianggarkan namun anggaran yang tersalurkan berupa program bantuan sosial dan lain sejenisnya. Bantuan-bantuan Sosial untuk penanganan pencegahan Kemiskinan Di Halmahera Barat lebih terpusat pada bantuan Bencana sehingga anggaran tidak bisa terealisasi pada satu arah dan menjadi Faktor penghambat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun diukur dari sudut angka statistik BPS kabupaten Halmahera Barat Seyogyanya dibandingkan dengan Kabupaten Lainnya di Wilayah Provinsi Maluku utara sudah termasuk angka kemiskinan yang terkecil Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat sebesar 8%. Angka ini merupakan salah satu yang terendah di Maluku Utara.

Kabupaten Halmahera Barat sebagai salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara yang merupakan Provinsi Kepulauan juga terdata angka stunting dan kemiskinan ekstrim yang perlu dilakukan penanganan dengan kebijakan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada sektor kesehatan akan tetapi juga terjadi disektor perekonomian. Sebagai upaya penanganan nasional dan daerah yang terdampak oleh stunting dan kemiskinan ekstrim, berbagai kebijakan mulai dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Salah satunya melalui kebijakan prioritas Program dan Kegiatan yang diarahkan pada pemulihan perekonomian dan pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam rangka pemulihan dampak ini, terutama bagi daerah-daerah dengan rasio kemandirian yang rendah. Akibat dari upaya penanganan ini, pada pelaksanaan anggaran pemerintah daerah terjadi perubahan asumsi dan kondisi *eksisting* yang



mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Angka kemiskinan yang begitu pesat bukan saja terjadi di Halmahera Barat bahkan dunia, hal tersebut perlu penanganan yang cukup serius oleh pemerintah pusat dengan dialokasi dana yang cukup memadai untuk bisa memprioritaskan program dan kegiatan yang sifatnya bisa membantu penurunan angka kemiskinan baik berupa pemberian lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, dengan kontribusi alat pertanian dan perikanan sehingga bisa terciptanya penurunan terhadap angka kemiskinan yang tidak di harapkan oleh bangsa ini.

Capaian terkait penurunan angka kemiskinan menurun dan tidak sesuai target dalam perjanjian Kinerja di Tahun 2024 dikarenakan program ekstrim penanganan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun Faktor **Keberhasilan** Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan 3 strategi utama dalam rangka mengantisipasi Angka Kemiskinan yaitu:

- 1) Penurunan beban pengeluaran;
- 2) Peningkatan Pendapatan dan;
- 3) Pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
- 4) Membangun fasilitas umum terutama Pasar Rakyat di Kecamatan Jailolo dan jalan akses rute lintas Kabupaten dari Kecamatan Jailolo menuju Kecamatan Loloda serta lintas Kabupaten Halmahera Barat ke menuju Halmahera Utara.

Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses kebutuhan dasar yang berimplikasi langsung terhadap Masyarakat Halmahera Barat,

Adapun Faktor faktor-faktor yang mempengaruhi **kegagalan** yang dinilai mampu dalam mengurangi angka kemiskinan yakni:

- 1) Program bantuan sosial dan penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat, dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dapat membantu mengurangi kemiskinan;
- 2) Kolaborasi Kerja sama antara pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan pihak eksternal yang dapat meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan yang terjadi;
- 3) Kebijakan yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga stabilitas harga pasar dapat membantu menurunkan angka kemiskinan.



- 4) Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengurangi kemiskinan karena dengan fasilitas tersebut masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang ada;
- 5) Intervensi pendidikan dan kesehatan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan;
- 6) Komitmen pimpinan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan keberhasilan pengurangan Angka Kemiskinan;
- 7) Stabilitas harga bahan pokok dan sembakau di pasaran dapat membantu menjaga konsumsi dasar masyarakat.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target penurunan kemiskinan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tabel berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
<i>Bidang Kesejahteraan Sosial</i>		
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	RP. 900,000,000



MISI KEEMPAT: MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DEMOKRATIS DAN MELAYANI YANG MEMBERIKAN RASA AMAN DAN ADIL BAGI MASYARAKAT

Sasaran Ke 6

Sasaran Ke-6 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Tabel: III.34

No	Sasaran	indikator	Target
6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
3. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) Tidak memberikan pendapat (TMP) adalah opini yang diberikan ketika auditor tidak meyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.
4. Tidak Wajar Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Adapun target dan realisasi pada capaian realisasi sasaran 7 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel adalah sebagai tabel berikut:

Tabel: III.35

No	Sasaran	indikator	Target	Realisasi
6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP



Dalam pencapaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penyelenggaraan Pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan bersifat akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi hal tersebut sebagaimana hasil laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara di Ternate, Pemerintah Halmahera Barat yang dipimpin oleh Bapak James Uang selaku Bupati Halmahera Barat suda mendapatkan WTP Ke-7 kalinya sebagaimana yang diberitakan pada maluttimes. (<https://maluttimes.com/2024/05/29/berturut-turut-pemda-halmahera-barat-raih-opini-wtp-yang-ketujuh-kali/>) penyerahan tersebut diberikan langsung oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara kepada Wakil Bupati Halmahera Barat Bapak Jufri Muhammad.

Gambar :III. 7



Penyerahan hasil WTP di BPK.R.I Perwakilan MALUT diterate

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel: III.36

No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel						Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian		Realisasi
	2022			2023			2024			
	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP		100%



c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.37

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
7	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
2022	2023	2024	
WTP	WTP	WTP	
REALISASI KINERJA			
2022	2023	2024	
100%	100%	100%	

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun capaian atas OPINI BPK terhadap LKPD di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat merupakan laporan keuangan dan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel, efektif dan efisiensi, dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mendapatkan predikat WTP dalam artian manajemen keuangannya sangat baik, dalam indikator tersebut atas capaiannya dianggap Bupati Halmahera Barat mampu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kepercayaan keuangan yang ditransfer dari pusat baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana lainnya.

Capaian opini WTP telah melebihi target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2021-2026 dengan capaian di Tahun 2024 adalah **WTP**. “Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun penyebab Keberhasilan dalam mencapai WTP adalah ;

- 1) APIP telah memiliki rencana pengawasan berbasis risiko.



- 2) Komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan budaya kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- 3) Adanya dukungan OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat Daerah dan pemeriksa lainnya.
- 4) Koordinasi yang berjalan baik antara Inspektorat Daerah dan OPD mitra dan adanya timbal balik serta komunikasi yang berjalan dengan baik.
- 5) Koordinasi yang intens antara Pegawai di Inspektorat Daerah.
- 6) Adanya Klinik Konsultasi di Inspektorat Daerah memudahkan OPD untuk berkonsultasi untuk meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga dapat meminimalisir temuan dan rekomendasi.
- 7) APIP berkomitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengendalian Intern Pemerintah dan penerapan Zona Integritas.

Adapun Penyebab **Kegagalan** adalah Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat ketercapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, antara lain :

- 1) Belum semua APIP mendapatkan pelatihan peningkatan dan pengembangan kompetensi.
- 2) Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tindak lanjut yang lama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Inspektorat Daerah perlu meningkatkan koordinasi oleh masing-masing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari semenjak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait, sehingga masih ada waktu bagi OPD untuk menyelesaikan tindak lanjut untuk waktu yang cukup. Sehingga seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi.
- 3) Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri diketahui bahwa masih banyak OPD yang mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembenahan tata kelola pemerintahan.
- 4) Terdapat beberapa hasil temuan pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti, namun belum dianggap cukup oleh BPK walaupun sudah menindaklanjuti



temuan BPK tersebut, karena penentuan suatu temuan selesai atau masih dalam proses adalah BPK Pusat. Sehingga hal ini dianggap menjadi tugas dan tanggung jawab bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk menyelesaikan.

- 5) Masih minimnya kompetensi SDM yang mampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasikan dengan baik.
- 6) Kurangnya kompetensi SDM di bidang pengawasan teknologi informasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga meminimalisir kerusakan atau kehilangan dokumen fisik

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target WTP adalah seluruh program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Program Pendukung Operasional Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel: III.37

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	BELANJA DAERAH	Rp. 1.222.377.463.048
2	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH	Rp. 7.697.706.751


Sasaran Ke 7
Sasaran Ke-7 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel: III.39

No	Sasaran	indikator	Target
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	B

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didefinisikan sebagai tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengukuran capaian kinerja, efektivitas sistem manajemen pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien yang meliputi Rencana Strategis, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Capaian kinerja, Evaluasi kinerja. Nilai SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori: D (0-30) C (30-50) CC (50-60) B (60-70) BB (70-80) A (80-90) AA (90-100)

a) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun capaian target kinerja dalam tahun ini dengan tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel: III.40

No	Sasaran						Indikator	Target	Capaian	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah						Nilai Sakip	C	CC	100%
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian		Realisasi
	2022			2023			2024			
	CC	C	90%	CC	C	90%	CC	CC		100%

b) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Adapun bentuk perbandingan capaian kinerja dengan dokumen setragis RPJMD Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel: III.41

No	Sasaran	Indikator	Realisasi
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	NILAI SAKIP	CC
TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN DALAM DOKUMEN RPJMD			
2022		2023	2024
B		BB	BB
REALISASI KINERJA			
2022		2023	2024
90%		80%	90%

Sumber data : RPJMD Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2021-2026



c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diberbagai daerah berdampak pada penghematan anggaran, pelayanan publik yang semakin baik, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Halmahera Barat adalah salah satu daerah yang meraih predikat C dalam implementasi SAKIP, Pernah mengalami Kenaikan Sebesar CC ditahun 2019 namun hingga saat ini SAKIP di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sangat minim Capaiannya

Perlu diketahui, dengan adanya penerapan SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Dalam penerapan SAKIP, anggaran hanya digunakan untuk membiayai program atau kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mendapatkan Predikat CC ditahun tahun sebelumnya terus berupaya untuk meningkatkan perolehan nilai dengan mengintegrasikan perencanaan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan. “Diharapkan kedepan Halmahera Barat bisa meraih predikat CC dapat berubah menjadi B di tahun selanjutnya dan kabupaten kita dorong agar bisa mencapai predikat tersebut.

Diharapkan ke depannya SAKIP dapat menjadi instrumen untuk tiap kabupaten dan kota untuk mencapai tujuan pemerintahan dalam menyejahterakan masyarakat. Instrumen yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena dengan SAKIP akan menjadikan APBD lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Setelah APBD dijalankan secara efisien, tentunya yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat

Adapun Penyebab Keberhasilan peningkatan terhadap SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 adalah:

- 1) Pemanfaatan Anggaran Daerah yang lebih baik dan efektif dipergunakan sehingga anggaran yang tidak perlu diperuntukkan dan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana mestinya, dilakukan perubahan anggaran melalui Pergeseran APBD dan juga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- 2) Bupati dan Sekretaris Daerah berperan Penting dalam Memonitoring dan Evaluasi Kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah terhadap Penilaian SAKIP;



- 3) Adanya Bimbingan Teknis terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Kota Ambon Propinsi Maluku Utara ditahun 2024 yang kemarin sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bisa mencapai Nilai CC dan lebih baik dari nilai sebelumnya di Tahun 2023
- 4) Adanya jalinan hubungan kerja sama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah sehingga Data Pendukung mudah didapatkan dalam rangka penyusunan dokumen SAKIP;

Adapun Penyebab Kegagalan terhadap peningkatan SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 adalah:

1. Laporan SAKIP tidak sesuai dengan RPJMD dan Visi Misi Bupati, sehingga output pengeluaran belanja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan pencernaan dan perjanjian kinerja;
2. Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Aparatur dalam memahami penyusunan Laporan Akuntabilitas untuk Organisasi Perangkat Daerah;
3. Kabupaten Halmahera Barat memiliki darah kepulauan dan daerah terpencil dimana di Kabupaten tersebut belum stabil koneksi jaringan seluler yang bisa berdampak pada komunikasi dan pelaporan SAKIP terlambat;

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai target SAKIP adalah seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penataan Organisasi dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Tabel: III.42

Tabel Program dan Kegiatan Yang berkaitan dengan Perjanjian Kinerja

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
3	PENATAAN ORGANISASI	RP. 150.000.000



B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
4	PENDAPATAN DAERAH	1.245.210.672.600,00	0,00	1.019.758.341.265,02	1.019.758.341.26
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.649.858.000,00	0,00	31.448.657.342,41	31.448.657.34
4.1.1	Pajak Daerah	10.773.756.000,00	0,00	5.761.124.015,00	5.761.124.01
4.1.1.06	Pajak Hotel	140.000.000,00	0,00	141.116.300,00	141.116.30
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	140.000.000,00	0,00	141.116.300,00	141.116.30
4.1.1.06.01.0001	Pajak Hotel	140.000.000,00	0,00	141.116.300,00	141.116.30
4.1.1.07	Pajak Restoran	578.580.000,00	0,00	432.740.925,00	432.740.92
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	572.580.000,00	0,00	432.740.925,00	432.740.92
4.1.1.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	572.580.000,00	0,00	432.740.925,00	432.740.92
4.1.1.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.09	Pajak Reklame	725.300.000,00	0,00	542.993.340,00	542.993.34
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	725.300.000,00	0,00	539.631.340,00	539.631.34
4.1.1.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	725.300.000,00	0,00	539.631.340,00	539.631.34
4.1.1.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	3.362.000,00	3.362.00
4.1.1.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	3.362.000,00	3.362.00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	3.559.276.000,00	0,00	3.805.475.182,00	3.805.475.18
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.559.276.000,00	0,00	3.805.475.182,00	3.805.475.18
4.1.1.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.559.276.000,00	0,00	3.805.475.182,00	3.805.475.18
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00	0,00	626.246.455,00	626.246.45
4.1.1.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.000.000.000,00	0,00	626.246.455,00	626.246.45
4.1.1.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.000.000.000,00	0,00	626.246.455,00	626.246.45
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.500.000.000,00	0,00	134.125.583,00	134.125.58
4.1.1.15.01	PBBP2	1.500.000.000,00	0,00	134.125.583,00	134.125.58
4.1.1.15.01.0001	PBBP2	1.500.000.000,00	0,00	134.125.583,00	134.125.58
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	270.600.000,00	0,00	78.426.230,00	78.426.23
4.1.1.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	270.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	270.600.000,00	0,00	0,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
4.1.1.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	0,00	78.426.230,00	78.426.23
4.1.1.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	0,00	78.426.230,00	78.426.23
4.1.2	Retribusi Daerah	2.239.756.000,00	0,00	1.932.313.339,00	1.932.313.33
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	842.195.000,00	0,00	415.761.000,00	415.761.00
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	0,00	41.770.000,00	41.770.00
4.1.2.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	250.000.000,00	0,00	41.770.000,00	41.770.00
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	165.000.000,00	0,00	149.805.000,00	149.805.00
4.1.2.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	165.000.000,00	0,00	149.805.000,00	149.805.00
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	196.980.000,00	0,00	38.214.000,00	38.214.00
4.1.2.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	196.980.000,00	0,00	38.214.000,00	38.214.00
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	230.215.000,00	0,00	185.972.000,00	185.972.00
4.1.2.01.05.0001	Retribusi Pelataran	71.645.000,00	0,00	41.882.000,00	41.882.00
4.1.2.01.05.0003	Retribusi Kios	158.570.000,00	0,00	144.090.000,00	144.090.00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.067.676.000,00	0,00	1.386.792.839,00	1.386.792.83
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	8.550.000,00	8.550.00
4.1.2.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	0,00	0,00	8.550.000,00	8.550.00
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	31.776.000,00	0,00	19.204.000,00	19.204.00
4.1.2.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00	0,00	19.204.000,00	19.204.00
4.1.2.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	31.776.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	600.000.000,00	0,00	890.348.839,00	890.348.83
4.1.2.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	600.000.000,00	0,00	890.348.839,00	890.348.83
4.1.2.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	47.500.000,00	0,00	54.015.000,00	54.015.00
4.1.2.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	47.500.000,00	0,00	54.015.000,00	54.015.00
4.1.2.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	388.400.000,00	0,00	414.675.000,00	414.675.00
4.1.2.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	388.400.000,00	0,00	414.675.000,00	414.675.00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	329.885.000,00	0,00	129.759.500,00	129.759.50
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	43.980.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.00
4.1.2.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	43.980.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.00
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.553.000,00	0,00	3.950.000,00	3.950.00
4.1.2.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.553.000,00	0,00	3.950.000,00	3.950.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
4.1.2.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	273.352.000,00	0,00	121.809.500,00	121.809.50
4.1.2.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	273.352.000,00	0,00	121.809.500,00	121.809.50
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.297.127.000,00	0,00	1.305.284.687,00	1.305.284.68
4.1.3.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.297.127.000,00	0,00	1.305.284.687,00	1.305.284.68
4.1.3.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.297.127.000,00	0,00	1.305.284.687,00	1.305.284.68
4.1.3.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.297.127.000,00	0,00	1.305.284.687,00	1.305.284.68
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	45.339.219.000,00	0,00	22.449.935.301,41	22.449.935.30
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	32.660.000,00	32.660.00
4.1.4.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	32.660.000,00	32.660.00
4.1.4.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00	32.660.000,00	32.660.00
4.1.4.04	Hasil Kerja Sama Daerah	228.700.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	228.700.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	228.700.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.05	Jasa Giro	613.942.000,00	0,00	308.795.458,34	308.795.45
4.1.4.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	613.942.000,00	0,00	219.046.078,20	219.046.07
4.1.4.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	613.942.000,00	0,00	219.046.078,20	219.046.07
4.1.4.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	65.532.732,39	65.532.73
4.1.4.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	65.532.732,39	65.532.73
4.1.4.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	5.910.981,68	5.910.98
4.1.4.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	5.910.981,68	5.910.98
4.1.4.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	(792.012,09)	(792.01
4.1.4.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	(792.012,09)	(792.01
4.1.4.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	0,00	(425.806,84)	(425.80
4.1.4.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	0,00	(425.806,84)	(425.80
4.1.4.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	19.523.485,00	19.523.48
4.1.4.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	19.523.485,00	19.523.48
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	130.447.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	130.447.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
4.1.4.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	130.447.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	17.031.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.00
4.1.4.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	17.031.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.00
4.1.4.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	17.031.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.00
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	46.720,00	46.72
4.1.4.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	46.720,00	46.72
4.1.4.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	46.720,00	46.72
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.000.000.000,00	0,00	899.357.060,19	899.357.06
4.1.4.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.000.000.000,00	0,00	899.357.060,19	899.357.06
4.1.4.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.000.000.000,00	0,00	899.357.060,19	899.357.06
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	572.296.000,00	0,00	2.430.563.906,65	2.430.563.90
4.1.4.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	98.318.549,00	98.318.54
4.1.4.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	98.318.549,00	98.318.54
4.1.4.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	970.894.280,90	970.894.28
4.1.4.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	960.379.080,90	960.379.08
4.1.4.15.04.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00	0,00	10.515.200,00	10.515.20
4.1.4.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	572.296.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	572.296.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	64.747.000,00	64.747.00
4.1.4.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00	53.972.000,00	53.972.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
4.1.4.15.09.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja TambahanPenghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0,00	0,00	10.775.000,00	10.775.00
4.1.4.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	15.550.000,00	15.550.00
4.1.4.15.10.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atasPemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak KendaraanBermotor	0,00	0,00	15.550.000,00	15.550.00
4.1.4.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	31.001.631,00	31.001.63
4.1.4.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	29.501.631,00	29.501.63
4.1.4.15.15.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.00
4.1.4.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	22.053.400,00	22.053.40
4.1.4.15.16.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-JasaPengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	22.053.400,00	22.053.40
4.1.4.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.00
4.1.4.15.30.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepadaPemerintah Pusat	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.00
4.1.4.15.31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	1.169.485.755,75	1.169.485.75
4.1.4.15.31.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepadaPemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	1.169.485.755,75	1.169.485.75
4.1.4.15.86	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.00
4.1.4.15.86.0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji danTunjangan Majelis Fungsional-Iuran Jaminan Kesehatan Majelis Fungsional	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
4.1.4.15.99	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD,	0,00	0,00	16.513.290,00	16.513.29
	Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD				
4.1.4.15.99.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	16.513.290,00	16.513.29
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	19.189.770.000,00	0,00	18.777.012.156,23	18.777.012.15
4.1.4.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	19.189.770.000,00	0,00	18.777.012.156,23	18.777.012.15
4.1.4.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	19.189.770.000,00	0,00	18.777.012.156,23	18.777.012.15
4.1.4.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573.064.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573.064.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	573.064.000,00	0,00	0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.155.798.106.600,00	0,00	980.205.111.231,00	980.205.111.23
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.115.976.458.000,00	0,00	957.703.373.395,00	957.703.373.39
4.2.1.01	Dana Perimbangan	983.352.868.000,00	0,00	820.491.400.395,00	820.491.400.39
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	245.347.062.000,00	0,00	154.866.120.124,00	154.866.120.12
4.2.1.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.387.954.000,00	0,00	2.885.997.135,00	2.885.997.13
4.2.1.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.673.888.000,00	0,00	1.227.490.000,00	1.227.490.00
4.2.1.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	13.054.000,00	13.054.00
4.2.1.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	28.397.000,00	0,00	16.323.200,00	16.323.20
4.2.1.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	4.444.600,00	4.444.60
4.2.1.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	235.640.972.000,00	0,00	148.190.306.124,00	148.190.306.12
4.2.1.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	329.620.000,00	0,00	242.274.065,00	242.274.06
4.2.1.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.286.231.000,00	0,00	2.286.231.000,00	2.286.231.00
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	520.546.198.000,00	0,00	461.628.248.405,00	461.628.248.40
4.2.1.01.02.0001	DAU	392.685.823.000,00	0,00	345.651.211.870,00	345.651.211.87
4.2.1.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja	32.466.501.000,00	0,00	20.583.171.535,00	20.583.171.53
4.2.1.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	43.935.818.000,00	0,00	43.935.809.000,00	43.935.809.00
4.2.1.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.729.879.000,00	0,00	35.729.879.000,00	35.729.879.00
4.2.1.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	15.728.177.000,00	0,00	15.728.177.000,00	15.728.177.00
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	120.350.193.000,00	0,00	103.979.616.369,00	103.979.616.36
4.2.1.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.160.407.000,00	0,00	1.157.444.878,00	1.157.444.87

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
4.2.1.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.933.690.000,00	0,00	9.905.392.000,00	9.905.392.00
4.2.1.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.540.219.000,00	0,00	6.525.431.998,00	6.525.431.99
4.2.1.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	997.475.000,00	0,00	929.474.675,00	929.474.67
4.2.1.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.600.286.000,00	0,00	2.559.404.000,00	2.559.404.00
4.2.1.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	7.358.534.000,00	0,00	7.341.682.849,00	7.341.682.84
4.2.1.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.460.179.000,00	0,00	9.571.055.261,00	9.571.055.26
4.2.1.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.890.000.000,00	0,00	4.685.996.855,00	4.685.996.85
4.2.1.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	77.409.403.000,00	0,00	61.303.733.853,00	61.303.733.85
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	97.109.415.000,00	0,00	100.017.415.497,00	100.017.415.49
4.2.1.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	23.927.920.000,00	0,00	23.926.006.156,00	23.926.006.15
4.2.1.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.405.000.000,00	0,00	1.405.000.000,00	1.405.000.00
4.2.1.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.119.494.000,00	0,00	30.238.290.000,00	30.238.290.00
4.2.1.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.606.655.000,00	0,00	1.956.500.000,00	1.956.500.00
4.2.1.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	14.582.149.000,00	0,00	16.995.499.000,00	16.995.499.00
4.2.1.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.222.721.000,00	0,00	5.041.390.805,00	5.041.390.80
4.2.1.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.172.030.000,00	0,00	3.639.597.000,00	3.639.597.00
4.2.1.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	0,00	408.740.000,00	408.740.00
4.2.1.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.838.190.000,00	0,00	2.046.198.100,00	2.046.198.10
4.2.1.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	150.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.00
4.2.1.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	142.800.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	308.614.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.113.842.000,00	0,00	14.285.194.436,00	14.285.194.43
4.2.1.05	Dana Desa	132.623.590.000,00	0,00	137.211.973.000,00	137.211.973.00
4.2.1.05.01	Dana Desa	132.623.590.000,00	0,00	137.211.973.000,00	137.211.973.00
4.2.1.05.01.0001	Dana Desa	132.623.590.000,00	0,00	137.211.973.000,00	137.211.973.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.821.648.600,00	0,00	22.501.737.836,00	22.501.737.83
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	39.821.648.600,00	0,00	22.501.737.836,00	22.501.737.83
4.2.2.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.821.648.600,00	0,00	22.501.737.836,00	22.501.737.83
4.2.2.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.744.386.200,00	0,00	1.271.378.398,00	1.271.378.39
4.2.2.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.395.626.800,00	0,00	1.845.531.895,00	1.845.531.89
4.2.2.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.340.303.900,00	0,00	8.770.512.081,00	8.770.512.08
4.2.2.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	891.595.600,00	0,00	418.641.422,00	418.641.42
4.2.2.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.449.736.100,00	0,00	10.195.674.040,00	10.195.674.04

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.762.708.000,00	0,00	8.104.572.691,61	8.104.572.69
4.3.1	Pendapatan Hibah	24.814.300.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	24.814.300.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	24.814.300.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	24.814.300.000,00	0,00	0,00	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.948.408.000,00	0,00	8.104.572.691,61	8.104.572.69
4.3.3.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.948.408.000,00	0,00	8.104.572.691,61	8.104.572.69
4.3.3.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.948.408.000,00	0,00	8.104.572.691,61	8.104.572.69
4.3.3.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.948.408.000,00	0,00	8.104.572.691,61	8.104.572.69
5	BELANJA DAERAH	1.222.377.463.048,00	0,00	1.012.743.889.620,22	1.012.743.889.62
5.1	BELANJA OPERASI	812.703.882.073,00	0,00	669.613.995.997,22	669.613.995.99
5.1.1	Belanja Pegawai	422.565.536.812,00	0,00	343.963.092.580,00	343.963.092.58
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	317.292.107.468,00	0,00	251.744.668.311,00	251.744.668.31
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	232.104.487.233,00	0,00	191.667.988.696,00	191.667.988.69
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	183.086.781.665,00	0,00	171.587.918.696,00	171.587.918.69
5.1.1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	49.017.705.568,00	0,00	20.080.070.000,00	20.080.070.00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.014.694.590,00	0,00	18.434.677.435,00	18.434.677.43
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.989.443.825,00	0,00	16.730.327.883,00	16.730.327.88
5.1.1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.025.250.765,00	0,00	1.704.349.552,00	1.704.349.55
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.823.218.000,00	0,00	5.008.394.000,00	5.008.394.00
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.823.218.000,00	0,00	5.008.394.000,00	5.008.394.00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.707.293.950,00	0,00	12.597.463.000,00	12.597.463.00
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.034.294.100,00	0,00	10.506.684.000,00	10.506.684.00
5.1.1.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.672.999.850,00	0,00	2.090.779.000,00	2.090.779.00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.933.800.500,00	0,00	2.436.055.000,00	2.436.055.00
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.089.590.000,00	0,00	2.436.055.000,00	2.436.055.00
5.1.1.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	844.210.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.377.295.980,00	0,00	11.204.387.880,00	11.204.387.88
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.185.317.888,00	0,00	9.990.556.260,00	9.990.556.26
5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.191.978.092,00	0,00	1.213.831.620,00	1.213.831.62
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	165.847.181,00	0,00	122.025.934,00	122.025.93
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	157.960.421,00	0,00	122.025.934,00	122.025.93
5.1.1.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.886.760,00	0,00	0,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.500.876,00	0,00	2.560.849,00	2.560.84
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.738.016,00	0,00	2.307.394,00	2.307.39
5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	762.860,00	0,00	253.455,00	253.45
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.509.378.058,00	0,00	8.638.062.993,00	8.638.062.99
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.895.439.237,00	0,00	7.837.765.955,00	7.837.765.95
5.1.1.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.613.938.821,00	0,00	800.297.038,00	800.297.03
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	591.417.854,00	0,00	392.474.433,00	392.474.43
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	453.842.126,00	0,00	348.127.157,00	348.127.15
5.1.1.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	137.575.728,00	0,00	44.347.276,00	44.347.27
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.774.253.545,00	0,00	1.189.697.030,00	1.189.697.03
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.361.526.362,00	0,00	1.053.591.430,00	1.053.591.43
5.1.1.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	412.727.183,00	0,00	136.105.600,00	136.105.60
5.1.1.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.231.719.701,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	945.103.603,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	286.616.098,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	55.200.000,00	0,00	50.881.061,00	50.881.06
5.1.1.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	55.200.000,00	0,00	50.881.061,00	50.881.06
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	43.447.502.591,00	0,00	33.836.875.218,00	33.836.875.21
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	27.868.215.091,00	0,00	23.342.375.218,00	23.342.375.21
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	27.868.215.091,00	0,00	23.342.375.218,00	23.342.375.21
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.028.500.000,00	0,00	1.882.000.000,00	1.882.000.00
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.028.500.000,00	0,00	1.882.000.000,00	1.882.000.00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	13.550.787.500,00	0,00	8.612.500.000,00	8.612.500.00
5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	13.550.787.500,00	0,00	8.612.500.000,00	8.612.500.00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.653.089.576,00	0,00	40.959.569.204,00	40.959.569.20
5.1.1.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	203.729.940,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.250.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	20.516.140,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	177.963.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.1.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan PedesaanDan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	34.341.636,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananKesehatan	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-PelayananPersampahan/Kebersihan	4.341.636,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkirdi Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-TempatPenginapan/Pesanggrahan/Vila	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin TempatPenjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayekuntuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-PersetujuanBangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	27.119.494.000,00	0,00	23.575.880.800,00	23.575.880.80
5.1.1.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	27.119.494.000,00	0,00	23.575.880.800,00	23.575.880.80
5.1.1.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	14.582.149.000,00	0,00	13.435.492.300,00	13.435.492.30
5.1.1.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	14.582.149.000,00	0,00	13.435.492.300,00	13.435.492.30
5.1.1.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.606.655.000,00	0,00	1.470.250.000,00	1.470.250.00
5.1.1.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.606.655.000,00	0,00	1.470.250.000,00	1.470.250.00
5.1.1.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.275.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.00
5.1.1.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.275.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.00
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	2.831.720.000,00	0,00	2.472.946.104,00	2.472.946.10
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.583.250.000,00	0,00	2.333.216.104,00	2.333.216.10
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	204.400.000,00	0,00	95.660.000,00	95.660.00
5.1.1.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	44.070.000,00	0,00	44.070.000,00	44.070.00
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.403.594.220,00	0,00	12.374.017.242,00	12.374.017.24
5.1.1.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	0,00	561.435.000,00	561.435.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.1.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	0,00	561.435.000,00	561.435.00
5.1.1.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	70.560.000,00	0,00	70.287.000,00	70.287.00
5.1.1.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	70.560.000,00	0,00	70.287.000,00	70.287.00
5.1.1.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.368.400,00	0,00	75.171.960,00	75.171.96
5.1.1.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.368.400,00	0,00	75.171.960,00	75.171.96
5.1.1.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	0,00	48.121.500,00	48.121.50
5.1.1.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	0,00	48.121.500,00	48.121.50
5.1.1.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	0,00	813.776.250,00	813.776.25
5.1.1.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	0,00	813.776.250,00	813.776.25
5.1.1.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	84.224.700,00	0,00	76.845.425,00	76.845.42
5.1.1.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	84.224.700,00	0,00	76.845.425,00	76.845.42
5.1.1.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	0,00	1.890.000.000,00	1.890.000.00
5.1.1.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	0,00	1.890.000.000,00	1.890.000.00
5.1.1.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	0,00	472.500.000,00	472.500.00
5.1.1.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	0,00	472.500.000,00	472.500.00
5.1.1.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	207.772.104,00	0,00	207.768.643,00	207.768.64
5.1.1.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	207.772.104,00	0,00	207.768.643,00	207.768.64
5.1.1.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.577.368.016,00	0,00	3.577.351.464,00	3.577.351.46
5.1.1.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	49.411.120,00	0,00	49.410.690,00	49.410.69
5.1.1.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.155.168,00	0,00	1.154.916,00	1.154.91
5.1.1.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.465.504,00	0,00	3.463.236,00	3.463.23
5.1.1.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.523.336.224,00	0,00	3.523.322.622,00	3.523.322.62
5.1.1.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.340.100.000,00	0,00	4.340.100.000,00	4.340.100.00
5.1.1.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.340.100.000,00	0,00	4.340.100.000,00	4.340.100.00
5.1.1.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	261.796.000,00	0,00	240.660.000,00	240.660.00
5.1.1.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	261.796.000,00	0,00	240.660.000,00	240.660.00
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.538.957,00	0,00	146.927.305,00	146.927.30
5.1.1.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.001.885,00	0,00	46.800.000,00	46.800.00
5.1.1.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.001.885,00	0,00	46.800.000,00	46.800.00
5.1.1.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.913.451,00	0,00	6.552.000,00	6.552.00
5.1.1.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.913.451,00	0,00	6.552.000,00	6.552.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.1.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.744.370,00	0,00	84.240.000,00	84.240.00
5.1.1.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.744.370,00	0,00	84.240.000,00	84.240.00
5.1.1.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.396.954,00	0,00	6.952.320,00	6.952.32
5.1.1.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.396.954,00	0,00	6.952.320,00	6.952.32
5.1.1.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	291.203,00	0,00	229.305,00	229.30
5.1.1.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	291.203,00	0,00	229.305,00	229.30
5.1.1.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.159,00	0,00	880,00	88
5.1.1.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.159,00	0,00	880,00	88
5.1.1.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.647.299,00	0,00	1.778.400,00	1.778.40
5.1.1.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.647.299,00	0,00	1.778.400,00	1.778.40
5.1.1.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.659,00	0,00	93.600,00	93.60
5.1.1.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.659,00	0,00	93.600,00	93.60
5.1.1.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	406.977,00	0,00	280.800,00	280.80
5.1.1.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	406.977,00	0,00	280.800,00	280.80
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	488.704.000,00	0,00	452.688.000,00	452.688.00
5.1.1.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	88.704.000,00	0,00	86.688.000,00	86.688.00
5.1.1.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	88.704.000,00	0,00	86.688.000,00	86.688.00
5.1.1.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	0,00	366.000.000,00	366.000.00
5.1.1.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	0,00	366.000.000,00	366.000.00
5.1.1.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	4.330.327.300,00	4.330.327.30
5.1.1.88.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	4.330.327.300,00	4.330.327.30
5.1.1.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	4.330.327.300,00	4.330.327.30
5.1.1.89	Belanja Pegawai BOSP	0,00	0,00	99.520.000,00	99.520.00
5.1.1.89.02	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	0,00	0,00	99.520.000,00	99.520.00
5.1.1.89.02.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	99.520.000,00	99.520.00
5.1.1.99	Belanja Pegawai BLUD	100.000.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.00
5.1.1.99.99	Belanja Pegawai BLUD	100.000.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.00
5.1.1.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	100.000.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	313.022.354.386,00	0,00	279.829.108.446,22	279.829.108.44
5.1.2.01	Belanja Barang	90.677.813.548,00	0,00	76.610.665.367,60	76.610.665.36
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.843.831.462,00	0,00	74.686.298.767,60	74.686.298.76
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	87.877.500,00	0,00	12.877.500,00	12.877.50
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.368.768.000,00	0,00	4.106.396.398,00	4.106.396.39

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.393.146.000,00	0,00	2.241.532.250,00	2.241.532.25
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.101.639.000,00	0,00	926.378.500,00	926.378.50
5.1.2.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.819.643.126,00	0,00	4.931.770.285,30	4.931.770.28
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.002.877.384,00	0,00	4.714.322.709,00	4.714.322.70
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	411.813.000,00	0,00	326.753.000,00	326.753.00
5.1.2.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/AdministrasiTender	156.200.000,00	0,00	156.200.000,00	156.200.00
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.690.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	221.660.500,00	0,00	191.444.240,00	191.444.24
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.191.357.000,00	0,00	2.420.055.464,60	2.420.055.46
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.00
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	370.000.00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	4.449.080.930,00	0,00	3.679.896.050,00	3.679.896.05
5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.200.000.000,00	0,00	1.770.948.762,70	1.770.948.76
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.072.726.000,00	0,00	1.255.364.780,00	1.255.364.78
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.321.644.985,00	0,00	26.778.103.142,00	26.778.103.14
5.1.2.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.962.472.237,00	0,00	1.036.876.651,00	1.036.876.65
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.760.190.000,00	0,00	3.305.200.999,00	3.305.200.99
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.462.204.000,00	0,00	1.342.932.896,00	1.342.932.89
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.017.956.800,00	0,00	12.387.382.140,00	12.387.382.14
5.1.2.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	300.000.000,00	0,00	298.312.500,00	298.312.50
5.1.2.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	349.500.000,00	0,00	174.270.000,00	174.270.00
5.1.2.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	175.000.000,00	0,00	174.547.500,00	174.547.50
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	521.000.000,00	0,00	379.680.000,00	379.680.00
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	424.550.000,00	0,00	301.440.000,00	301.440.00
5.1.2.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	224.500.000,00	0,00	162.160.000,00	162.160.00
5.1.2.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	164.050.000,00	0,00	150.050.000,00	150.050.00
5.1.2.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	25.000.000,00	0,00	8.688.000,00	8.688.00
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	537.700.000,00	0,00	396.280.000,00	396.280.00
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	543.450.000,00	0,00	517.750.000,00	517.750.00
5.1.2.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	186.135.000,00	0,00	153.685.000,00	153.685.00
5.1.2.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.833.982.086,00	0,00	1.924.366.600,00	1.924.366.60
5.1.2.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	679.146.250,00	0,00	611.445.000,00	611.445.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.2.01.04.0049	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	18.610.000,00	0,00	18.610.000,00	18.610.00
5.1.2.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel	0,00	0,00	227.591.600,00	227.591.60
5.1.2.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.00
5.1.2.01.04.0137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.00
5.1.2.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer UnitLainnya	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.00
5.1.2.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.991.225.836,00	0,00	921.820.000,00	921.820.00
5.1.2.01.04.0546	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	0,00	99.900.000,00	99.900.00
5.1.2.01.04.0566	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan MenaraPerambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.02	Belanja Jasa	68.732.980.630,00	0,00	56.510.585.601,20	56.510.585.60
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	47.588.913.930,00	0,00	39.773.405.997,20	39.773.405.99
5.1.2.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	232.600.000,00	0,00	232.600.000,00	232.600.00
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.140.938.000,00	0,00	984.109.000,00	984.109.00
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.787.464.818,00	0,00	3.499.619.909,00	3.499.619.90
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	54.000.00
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.00
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasidan Pengelola Website	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.00
5.1.2.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	318.000.000,00	0,00	309.600.000,00	309.600.00
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.886.789.000,00	0,00	14.621.859.109,20	14.621.859.10
5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	52.715.000,00	0,00	52.715.000,00	52.715.00
5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.600.400.000,00	0,00	2.600.400.000,00	2.600.400.00
5.1.2.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	518.400.000,00	0,00	518.400.000,00	518.400.00
5.1.2.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	425.688.000,00	0,00	333.688.000,00	333.688.00
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	775.000.000,00	0,00	775.000.000,00	775.000.00
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.629.609.020,00	0,00	1.409.730.471,00	1.409.730.47
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	436.500.000,00	0,00	435.000.000,00	435.000.00
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	31.500.000,00	0,00	30.735.845,00	30.735.84

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.717.470.000,00	0,00	5.046.920.000,00	5.046.920.00
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.147.432.500,00	0,00	1.102.687.000,00	1.102.687.00
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	74.350.000,00	0,00	74.350.000,00	74.350.00
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	295.200.000,00	0,00	278.600.000,00	278.600.00
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.500.00
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.00
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.00
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	48.624.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.00
5.1.2.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.00
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	481.800.000,00	0,00	451.800.000,00	451.800.00
5.1.2.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	108.000.000,00	0,00	77.500.000,00	77.500.00
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	102.970.392,00	0,00	83.789.610,00	83.789.61
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	381.907.500,00	0,00	353.847.572,00	353.847.57
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.176.390.000,00	0,00	2.815.338.555,00	2.815.338.55
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	449.437.000,00	0,00	296.257.000,00	296.257.00
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.429.484.700,00	0,00	1.110.698.325,00	1.110.698.32
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	157.624.000,00	0,00	157.325.331,00	157.325.33
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.00
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	1.275.120.000,00	0,00	1.213.335.270,00	1.213.335.27
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.021.352.000,00	0,00	265.291.200,00	265.291.20
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	154.384.000,00	0,00	117.907.200,00	117.907.20
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	191.968.000,00	0,00	147.384.000,00	147.384.00
5.1.2.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	275.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.02.03	Belanja Sewa Tanah	320.000.000,00	0,00	280.000.000,00	280.000.00
5.1.2.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	320.000.000,00	0,00	280.000.000,00	280.000.00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.099.866.000,00	0,00	3.444.590.000,00	3.444.590.00
5.1.2.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	19.560.000,00	0,00	19.560.000,00	19.560.00
5.1.2.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	2.601.000,00	0,00	2.601.000,00	2.601.00
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	950.450.000,00	0,00	785.050.000,00	785.050.00
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	31.600.00
5.1.2.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.00
5.1.2.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.00
5.1.2.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.495.000.000,00	0,00	1.365.000.000,00	1.365.000.00
5.1.2.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	52.500.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.2.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.00
5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.004.555.000,00	0,00	733.905.000,00	733.905.00
5.1.2.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	109.100.000,00	0,00	70.700.000,00	70.700.00
5.1.2.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.00
5.1.2.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.00
5.1.2.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	160.000.000,00	0,00	159.174.000,00	159.174.00
5.1.2.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	200.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.511.740.000,00	0,00	2.258.863.203,00	2.258.863.20
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	413.400.000,00	0,00	369.400.000,00	369.400.00
5.1.2.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.00
5.1.2.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.00
5.1.2.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.178.340.000,00	0,00	1.044.463.203,00	1.044.463.20
5.1.2.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	700.000.000,00	0,00	625.000.000,00	625.000.00
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.829.334.900,00	0,00	5.754.161.401,00	5.754.161.40
5.1.2.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra DesainArsitektural	1.265.510.175,00	0,00	1.090.804.000,00	1.090.804.00
5.1.2.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.100.000.000,00	0,00	1.099.100.000,00	1.099.100.00
5.1.2.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan danKelayakan Bangunan Gedung	250.000.000,00	0,00	249.428.000,00	249.428.00
5.1.2.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.149.100.000,00	0,00	999.050.000,00	999.050.00
5.1.2.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan KonsultansiRekayasa Teknik	892.000.000,00	0,00	597.000.000,00	597.000.00
5.1.2.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.00
5.1.2.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.173.627.600,00	0,00	942.127.600,00	942.127.60
5.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	940.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas PekerjaanKonstruksi Bangunan Gedung	410.920.125,00	0,00	410.515.950,00	410.515.95
5.1.2.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas PekerjaanKonstruksi Teknik Sipil Transportasi	528.177.000,00	0,00	296.185.851,00	296.185.85
5.1.2.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas PekerjaanKonstruksi Teknik Sipil Air	100.000.000,00	0,00	49.950.000,00	49.950.00
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.348.750.000,00	0,00	2.958.750.000,00	2.958.750.00
5.1.2.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan BantuanTeknik	3.009.000.000,00	0,00	2.709.000.000,00	2.709.000.00
5.1.2.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-Jasa Konsultansi DestinasiPariwisata	339.750.000,00	0,00	249.750.000,00	249.750.00
5.1.2.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.2.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.899.023.800,00	0,00	1.661.523.800,00	1.661.523.80
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	889.000.000,00	0,00	666.500.000,00	666.500.00
5.1.2.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	485.000.000,00	0,00	485.000.000,00	485.000.00
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	525.023.800,00	0,00	510.023.800,00	510.023.80
5.1.2.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	64.000.00
5.1.2.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.00
5.1.2.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	18.550.262.800,00	0,00	16.129.752.903,00	16.129.752.90
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.203.765.000,00	0,00	1.284.842.480,00	1.284.842.48
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan	78.500.000,00	0,00	78.500.000,00	78.500.00
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang	507.425.000,00	0,00	837.962.480,00	837.962.48
5.1.2.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Angkutan Barang	30.000.000,00	0,00	13.250.000,00	13.250.00
5.1.2.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat AngkutanApung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.00
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat KantorLainnya	7.790.000,00	0,00	7.790.000,00	7.790.00
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin	293.050.000,00	0,00	171.710.000,00	171.710.00
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.00
5.1.2.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-PeralatanStudio Audio	75.000.000,00	0,00	39.800.000,00	39.800.00
5.1.2.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film	75.000.000,00	0,00	38.700.000,00	38.700.00
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.00
5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	100.000.000,00	0,00	60.130.000,00	60.130.00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.171.497.800,00	0,00	13.973.435.759,00	13.973.435.75
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	2.720.714.600,00	0,00	1.914.211.048,00	1.914.211.04

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.2.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGudang	497.000.000,00	0,00	495.840.859,00	495.840.85
5.1.2.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanKesehatan	1.600.000.000,00	0,00	1.407.683.088,00	1.407.683.08
5.1.2.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Tempat Ibadah	100.000.000,00	0,00	99.677.112,00	99.677.11
5.1.2.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Tempat Pertemuan	320.000.000,00	0,00	319.668.250,00	319.668.25
5.1.2.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Tempat Pendidikan	10.778.783.200,00	0,00	9.736.355.402,00	9.736.355.40
5.1.2.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanTerbuka	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-RumahNegara Golongan II	55.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.175.000.000,00	0,00	871.474.664,00	871.474.66
5.1.2.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.175.000.000,00	0,00	871.474.664,00	871.474.66
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.796.498.508,00	0,00	76.695.552.263,00	76.695.552.26
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.796.498.508,00	0,00	76.695.552.263,00	76.695.552.26
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	606.270.000,00	606.270.00
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.176.429.008,00	0,00	50.525.970.950,00	50.525.970.95
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	491.779.500,00	0,00	463.189.500,00	463.189.50
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.128.290.000,00	0,00	25.100.121.813,00	25.100.121.81
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.075.524.900,00	0,00	8.424.234.485,00	8.424.234.48
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	791.500.000,00	0,00	641.500.000,00	641.500.00
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	491.500.000,00	0,00	491.500.000,00	491.500.00
5.1.2.05.01.0003	Belanja Beasiswa	300.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.00
5.1.2.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.284.024.900,00	0,00	7.782.734.485,00	7.782.734.48
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.576.830.000,00	0,00	3.276.830.000,00	3.276.830.00
5.1.2.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.707.194.900,00	0,00	4.505.904.485,00	4.505.904.48
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.718.990.000,00	0,00	12.804.075.375,00	12.804.075.37
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.718.990.000,00	0,00	12.804.075.375,00	12.804.075.37
5.1.2.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.718.990.000,00	0,00	12.804.075.375,00	12.804.075.37
5.1.2.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00	188.000.000,00	188.000.00
5.1.2.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0,00	0,00	188.000.000,00	188.000.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.2.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	0,00	147.320.800,00	147.320.80
5.1.2.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	0,00	0,00	40.679.200,00	40.679.20
5.1.2.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.279.614.000,00	0,00	13.979.288.656,00	13.979.288.65
5.1.2.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.279.614.000,00	0,00	13.979.288.656,00	13.979.288.65
5.1.2.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.279.614.000,00	0,00	13.979.288.656,00	13.979.288.65
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.190.670.000,00	0,00	18.486.953.795,42	18.486.953.79
5.1.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.190.670.000,00	0,00	18.486.953.795,42	18.486.953.79
5.1.2.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.190.670.000,00	0,00	18.486.953.795,42	18.486.953.79
5.1.3	Belanja Bunga	12.513.281.215,00	0,00	0,00	
5.1.3.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	12.513.281.215,00	0,00	0,00	
5.1.3.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	12.513.281.215,00	0,00	0,00	
5.1.3.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	12.513.281.215,00	0,00	0,00	
5.1.5	Belanja Hibah	60.407.709.660,00	0,00	42.226.794.971,00	42.226.794.97
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.544.599.660,00	0,00	33.123.533.872,00	33.123.533.87
5.1.5.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.650.000.000,00	0,00	3.404.548.872,00	3.404.548.87
5.1.5.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.650.000.000,00	0,00	3.404.548.872,00	3.404.548.87
5.1.5.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.594.599.660,00	0,00	28.518.985.000,00	28.518.985.00
5.1.5.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.594.599.660,00	0,00	28.518.985.000,00	28.518.985.00
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.300.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.00
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.300.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.00
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.609.870.000,00	0,00	7.999.146.099,00	7.999.146.09
5.1.5.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.609.870.000,00	0,00	7.999.146.099,00	7.999.146.09

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.1.5.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.609.870.000,00	0,00	7.999.146.099,00	7.999.146.09
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.123.160.000,00	0,00	1.029.115.000,00	1.029.115.00
5.1.5.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.123.160.000,00	0,00	1.029.115.000,00	1.029.115.00
5.1.5.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.123.160.000,00	0,00	1.029.115.000,00	1.029.115.00
5.1.5.08	Belanja Hibah Dana BOSP	130.080.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.00
5.1.5.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	130.080.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.00
5.1.5.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	130.080.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.195.000.000,00	0,00	3.595.000.000,00	3.595.000.00
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	760.000.000,00	0,00	705.000.000,00	705.000.00
5.1.6.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	760.000.000,00	0,00	705.000.000,00	705.000.00
5.1.6.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	760.000.000,00	0,00	705.000.000,00	705.000.00
5.1.6.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.435.000.000,00	0,00	2.890.000.000,00	2.890.000.00
5.1.6.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.435.000.000,00	0,00	2.890.000.000,00	2.890.000.00
5.1.6.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.435.000.000,00	0,00	2.890.000.000,00	2.890.000.00
5.2	BELANJA MODAL	207.743.989.478,00	0,00	143.132.415.820,00	143.132.415.82
5.2.1	Belanja Modal Tanah	507.500.000,00	0,00	365.000.000,00	365.000.00
5.2.1.01	Belanja Modal Tanah	507.500.000,00	0,00	365.000.000,00	365.000.00
5.2.1.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	507.500.000,00	0,00	365.000.000,00	365.000.00
5.2.1.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	507.500.000,00	0,00	365.000.000,00	365.000.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.187.770.622,00	0,00	28.245.063.296,00	28.245.063.29
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	192.500.000,00	0,00	122.750.000,00	122.750.00
5.2.2.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	192.500.000,00	0,00	122.750.000,00	122.750.00
5.2.2.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	192.500.000,00	0,00	122.750.000,00	122.750.00
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.268.295.110,00	0,00	6.745.240.710,00	6.745.240.71
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.285.500.000,00	0,00	5.757.450.000,00	5.757.450.00
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	525.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.760.000.000,00	0,00	5.757.450.000,00	5.757.450.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.2.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	4.995.600,00	4.995.60
5.2.2.02.02.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	0,00	0,00	4.995.600,00	4.995.60
5.2.2.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	982.795.110,00	0,00	982.795.110,00	982.795.11
5.2.2.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	982.795.110,00	0,00	982.795.110,00	982.795.11
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	155.500.000,00	0,00	155.500.000,00	155.500.00
5.2.2.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	155.500.000,00	0,00	155.500.000,00	155.500.00
5.2.2.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	155.500.000,00	0,00	155.500.000,00	155.500.00
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	291.500.000,00	0,00	291.500.000,00	291.500.00
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	291.500.000,00	0,00	291.500.000,00	291.500.00
5.2.2.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	291.500.000,00	0,00	291.500.000,00	291.500.00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.056.552.869,00	0,00	3.315.959.780,00	3.315.959.78
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	238.162.000,00	0,00	428.491.200,00	428.491.20
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	129.151.200,00	129.151.20
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	238.162.000,00	0,00	299.340.000,00	299.340.00
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.818.390.869,00	0,00	2.887.468.580,00	2.887.468.58
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.204.400.869,00	0,00	2.163.384.980,00	2.163.384.98
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	290.000.000,00	0,00	315.350.000,00	315.350.00
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	241.490.000,00	0,00	262.545.800,00	262.545.80
5.2.2.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.00
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	82.500.000,00	0,00	144.087.800,00	144.087.80
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.503.610.200,00	0,00	383.274.077,00	383.274.07
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	3.497.610.200,00	0,00	373.774.077,00	373.774.07
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	250.000.000,00	0,00	250.949.077,00	250.949.07
5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.177.610.200,00	0,00	122.825.000,00	122.825.00
5.2.2.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	70.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.00
5.2.2.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.00
5.2.2.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.00
5.2.2.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.00
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.575.845.128,00	0,00	14.388.726.420,00	14.388.726.42
5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.627.471.102,00	0,00	7.706.524.428,00	7.706.524.42
5.2.2.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.599.950.000,00	0,00	2.301.454.000,00	2.301.454.00
5.2.2.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.077.522.604,00	0,00	487.669.000,00	487.669.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.2.2.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	834.610.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	169.500.000,00	0,00	169.500.000,00	169.500.00
5.2.2.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	2.100.066.079,00	0,00	2.081.000.000,00	2.081.000.00
5.2.2.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	459.410.920,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.235.501.428,00	0,00	2.235.501.428,00	2.235.501.42
5.2.2.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.150.910.071,00	0,00	431.400.000,00	431.400.00
5.2.2.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.948.374.026,00	0,00	6.682.201.992,00	6.682.201.99
5.2.2.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.948.374.026,00	0,00	6.682.201.992,00	6.682.201.99
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.127.908.315,00	0,00	596.971.900,00	596.971.90
5.2.2.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	533.908.315,00	0,00	533.495.500,00	533.495.50
5.2.2.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	476.983.315,00	0,00	476.571.000,00	476.571.00
5.2.2.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	56.925.000,00	0,00	56.924.500,00	56.924.50
5.2.2.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	50.000.000,00	0,00	63.476.400,00	63.476.40
5.2.2.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.00
5.2.2.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	11.486.400,00	11.486.40
5.2.2.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	50.000.000,00	0,00	49.990.000,00	49.990.00
5.2.2.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	544.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	544.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	1.996.959.000,00	0,00	2.206.070.609,00	2.206.070.60
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.910.137.000,00	0,00	1.948.351.691,00	1.948.351.69
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	190.000.00
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.710.137.000,00	0,00	1.758.351.691,00	1.758.351.69
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	86.822.000,00	0,00	257.718.918,00	257.718.91
5.2.2.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.00
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	86.822.000,00	0,00	233.973.918,00	233.973.91
5.2.2.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	22.745.000,00	22.745.00
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	19.405.500,00	19.405.50
5.2.2.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	19.405.500,00	19.405.50
5.2.2.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	19.405.500,00	19.405.50
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	1.664.300,00	1.664.30
5.2.2.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	1.664.300,00	1.664.30

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.2.2.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	1.664.300,00	1.664.30
5.2.2.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	19.100.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.00
5.2.2.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	19.100.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.00
5.2.2.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	19.100.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.786.782.906,00	0,00	36.214.113.965,00	36.214.113.96
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	66.624.956.156,00	0,00	35.154.072.941,00	35.154.072.94
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.208.778.716,00	0,00	35.154.072.941,00	35.154.072.94
5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	872.297.000,00	0,00	869.077.900,00	869.077.90
5.2.3.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	250.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	190.347.084,00	0,00	190.347.084,00	190.347.08
5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	55.458.168.332,00	0,00	25.456.115.804,00	25.456.115.80
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.048.186.300,00	0,00	8.249.152.153,00	8.249.152.15
5.2.3.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	190.000.000,00	0,00	189.600.000,00	189.600.00
5.2.3.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	199.780.000,00	0,00	199.780.000,00	199.780.00
5.2.3.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	416.177.440,00	0,00	0,00	
5.2.3.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	416.177.440,00	0,00	0,00	
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.081.826.750,00	0,00	980.069.624,00	980.069.62
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.081.826.750,00	0,00	980.069.624,00	980.069.62
5.2.3.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.081.826.750,00	0,00	980.069.624,00	980.069.62
5.2.3.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	80.000.000,00	0,00	79.971.400,00	79.971.40
5.2.3.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	80.000.000,00	0,00	79.971.400,00	79.971.40
5.2.3.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	80.000.000,00	0,00	79.971.400,00	79.971.40
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.721.935.950,00	0,00	77.054.228.809,00	77.054.228.80
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	85.309.378.380,00	0,00	70.803.517.914,00	70.803.517.91
5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	83.339.878.380,00	0,00	69.446.214.482,00	69.446.214.48
5.2.4.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	83.339.878.380,00	0,00	69.446.214.482,00	69.446.214.48
5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.969.500.000,00	0,00	1.357.303.432,00	1.357.303.43
5.2.4.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.969.500.000,00	0,00	1.357.303.432,00	1.357.303.43
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.341.557.570,00	0,00	4.470.420.895,00	4.470.420.89
5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.656.515.500,00	0,00	2.463.878.368,00	2.463.878.36
5.2.4.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	3.656.515.500,00	0,00	2.463.878.368,00	2.463.878.36

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.2.4.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	549.700.000,00	0,00	379.233.091,00	379.233.09
5.2.4.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	549.700.000,00	0,00	379.233.091,00	379.233.09
5.2.4.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.856.527.270,00	0,00	629.727.270,00	629.727.27
5.2.4.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2.856.527.270,00	0,00	629.727.270,00	629.727.27
5.2.4.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.278.814.800,00	0,00	997.582.166,00	997.582.16
5.2.4.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.278.814.800,00	0,00	997.582.166,00	997.582.16
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	3.271.000.000,00	0,00	988.320.000,00	988.320.00
5.2.4.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.500.000.000,00	0,00	988.320.000,00	988.320.00
5.2.4.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.500.000.000,00	0,00	988.320.000,00	988.320.00
5.2.4.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	761.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.4.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	761.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.4.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.010.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.4.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.010.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.4.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	800.000.000,00	0,00	791.970.000,00	791.970.00
5.2.4.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	800.000.000,00	0,00	791.970.000,00	791.970.00
5.2.4.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	800.000.000,00	0,00	791.970.000,00	791.970.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	240.000.000,00	0,00	954.009.750,00	954.009.75
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	240.000.000,00	0,00	954.009.750,00	954.009.75
5.2.5.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	210.000.000,00	0,00	924.009.750,00	924.009.75
5.2.5.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	210.000.000,00	0,00	924.009.750,00	924.009.75
5.2.5.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.00
5.2.5.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.00
5.2.6.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.00
5.2.6.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.00
5.2.6.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.443.326.197,00	0,00	6.222.552.390,00	6.222.552.39
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.443.326.197,00	0,00	6.222.552.390,00	6.222.552.39
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	6.443.326.197,00	0,00	6.222.552.390,00	6.222.552.39
5.3.1.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.443.326.197,00	0,00	6.222.552.390,00	6.222.552.39

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.3.1.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.443.326.197,00	0,00	6.222.552.390,00	6.222.552.39
5.4	BELANJA TRANSFER	195.486.265.300,00	0,00	193.774.925.413,00	193.774.925.41
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.157.636.300,00	0,00	0,00	
5.4.1.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.157.636.300,00	0,00	0,00	
5.4.1.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.157.636.300,00	0,00	0,00	
5.4.1.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.157.636.300,00	0,00	0,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	194.328.629.000,00	0,00	193.774.925.413,00	193.774.925.41
5.4.2.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	194.328.629.000,00	0,00	193.774.925.413,00	193.774.925.41
5.4.2.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	132.623.590.000,00	0,00	137.211.973.000,00	137.211.973.00
5.4.2.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	132.623.590.000,00	0,00	137.211.973.000,00	137.211.973.00
5.4.2.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	61.705.039.000,00	0,00	56.562.952.413,00	56.562.952.41
5.4.2.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	61.705.039.000,00	0,00	56.562.952.413,00	56.562.952.41
	SURPLUS / DEFISIT	22.833.209.552,00	0,00	7.014.451.644,80	7.014.451.64
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	(3.297.510.880,98)	(3.297.510.88
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	(3.297.510.880,98)	(3.297.510.88
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.02.01.0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya AlamPengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya AlamMineral dan Batu Bara-Royalty	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya AlamKehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
6.1.1.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana	0,00	0,00	(3.210.088.866,75)	(3.210.088.866,75)
	Pengeluaran Pembiayaan				
6.1.1.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	(3.210.088.866,75)	(3.210.088.866,75)
6.1.1.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	(3.210.088.866,75)	(3.210.088.866,75)
6.1.1.99	Koreksi SiLPA	0,00	0,00	(87.422.014,23)	(87.422.014,23)
6.1.1.99.01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	(87.422.014,23)	(87.422.014,23)
6.1.1.99.01.0001	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	(87.422.014,23)	(87.422.014,23)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.833.209.552,00	0,00	0,00	
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.833.209.552,00	0,00	0,00	
6.2.3.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	22.833.209.552,00	0,00	0,00	
6.2.3.03.09	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	22.833.209.552,00	0,00	0,00	
	-Swasta-Jangka Panjang				
6.2.3.03.09.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	22.833.209.552,00	0,00	0,00	
	-Swasta-Jangka Panjang				
	PEMBIAYAAN NETTO	(22.833.209.552,00)	0,00	(3.297.510.880,98)	(3.297.510.880,98)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	3.716.940.763,82	3.716.940.763,82



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan laporan kinerja ini setidaknya memiliki 2 (dua) fungsi yaitu bagi internal organisasi sebagai media untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan bagi masyarakat diharapkan sebagai sarana untuk menilai kualitas penyelenggara pemerintahan sebagai pihak penerima amanah.

Dokumen ini merupakan gambaran pencapaian target-target sasaran dari setiap Agenda, Kebijakan dan Program Pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021–2026 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024. Evaluasi kinerja ini perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Namun pelaksanaan terhadap Dokumen tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan Regulasi Daerah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023, yang kemudian direpresentasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan sebagai Target dan sasaran yang akan dicapai oleh Bupati Halmahera Barat sebagai target dan sasaran tercapaian tujuan dari visi dan misi Bupati Halmahera Barat di Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, nampak bahwa masih terdapat indikator sasaran yang tidak dapat diukur, hal ini disebabkan karena indikator-indikator tersebut bersifat kualitatif. Namun demikian, capaian indikator utama yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat nampak telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan pada pencapaian tahun berjalan.



Pengukuran kinerja serta analisis capaian kinerja sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya memuat pencapaian kinerja tahun pelaporan (2024) dan juga membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya serta beberapa tahun kebelakang, yang muaranya mengarah pada target akhir pencapaian dari Perjanjian Kinerja yang diukur capaiannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara umum dapat dikatakan kinerja dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2024 dikategorikan **“Sangat Baik”**, karena dari 6 sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator target realisasi dan capaian Kabupaten Halmahera Barat dan Perjanjian Kerja (PK), mendapatkan predikat sasaran berpredikat **“Sangat BAIK”** dan sementara pada 1 Sasaran dalam rangka upaya penurunan angka kemiskinan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Walaupun demikian, dalam melaksanakan program/kegiatan dalam upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang sangat signifikan yakni masih adanya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan program yang telah disepakati dalam RPJMD, hal ini disebabkan karena Rencana Pembangunan Strategis (RENSTRA) SKPD yang menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan pada setiap SKPD belum seutuhnya bersinergi dengan RPJMD tahun 2021 - 2026. Dengan kondisi yang demikian maka apa yang dilakukan oleh sebahagian Organisasi Perangkat Daerah tidak terfokus pada upaya pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perbaikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Halmahera Barat terus dilakukan demi pencapaian hasil dari Visi dan Misi Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
JAILOLO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Misi 1	Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal		
1		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	67,81
2		Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,70 14,00
	Misi 2	Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;		
3		Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	71,57
	Misi 3	Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya		
4		Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen) 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 3. Lama tinggal	500 15.000 2 3,5

			Wisatawan Mancanegara 4. Lama tinggal Wisatawan Nusantara	
5		Menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,53%
	Misi 4	Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat		
6		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
7		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B

Jailolo, 03 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG, S.Pd., MM

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN KESEHATAN		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 54.012.698.000
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.500.000.000
3	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Rp. 17.000.000.000
4	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Rp.1.750.000.000
5	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standa	Rp.1.000.000.000
6	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Rp.1.000.000.000
7	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Rp.3.750.000.00
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.29.162.698.000
9	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.250.000.000
10	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.645.000.000
11	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.250.000.000
12	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.250.000.000
13	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.100.000.000
14	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.100.000.000
15	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.100.000.000
16	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp.100.000.000
17	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Rp.100.000.000
18	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Rp.100.000.000
19	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.1.000.000.000
20	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.250.000.000
21	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp.250.000.000
22	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp.250.000.000

23	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp.20.000.000.000
24	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4.567.698.000
25	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Rp.750.000.000
26	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Rp.100.000.000
27	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp.350.000.000
28	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp.350.000.000
29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 250.000.000
30	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000
31	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 150.000.000
32	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.100.000.000
33	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Rp.100.000.000
34	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp.200.000.000
35	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.100.000.000
36	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.100.000.000
37	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.100.000.000
38	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.100.000.000
39	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp.100.000.000
40	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.100.000.000
41	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Rp.100.000.000

	Daya Masyarakat (UKBM)	
--	------------------------	--

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
URUSAN PENDIDIKAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RP. 140.975.590.869
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 101.495.875.403
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 39.079.715.466
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 400.000.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 300.000.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp. 100.000.000
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 50.000.000

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	RP. 63,000,000,

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 5,957,948,460
2	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 1,407,500,000
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 616,000,000
No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL		
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	RP. 900,000,000

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	BELANJA DAERAH	Rp. 1.222.377.463.048
2	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH	Rp. 7.697.706.751
3	PENATAAN ORGANISASI	RP. 150.000.000

Jailolo, 02 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG, S.Pd., MM



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
INSPEKTORAT

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo
No. Tlp. (0922) 21001-2221074, Fax. (0922) 21501-2221074 Email :
inspektorathalbar@yahoo.com
PROVINSI MALUKU UTARA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat** untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab **Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jailolo, 24 Februari 2025


Plt. Inspektur Daerah,

Reinhard Bunga, S.Pd. M.Pd, CRMO, QRMP, CGAA
Pembina IV/a
NIP. 198308152009031001



DOKUMEN PENDUKUNG PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024





GOVERNOR NORTH MALUKU

Piagam Penghargaan

Given to

LAW DEPARTMENT SECRETARIAT REGIONAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Sebagai

Member of the Documentation and Legal Information Network I Year 2024

Sofifi, 13 August 2024

Pj. GOVERNOR NORTH MALUKU



Drs. Hi. SAMSUDDIN ABDUL KADIR, M.Si



MINISTER OF HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: MHA-01.HA.02.01.01 Tahun 2024

Given to :

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Yang telah :

Obtain the Title of Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia Year 2023

Jakarta, 10 December 2024

Minister of Human Rights of the Republic of Indonesia



Natalius Pigai





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR : 1029/Men/TK.05/7/2023

Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

**Sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2023
Kategori Pratama**

Semarang, 22 Juli 2023

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.



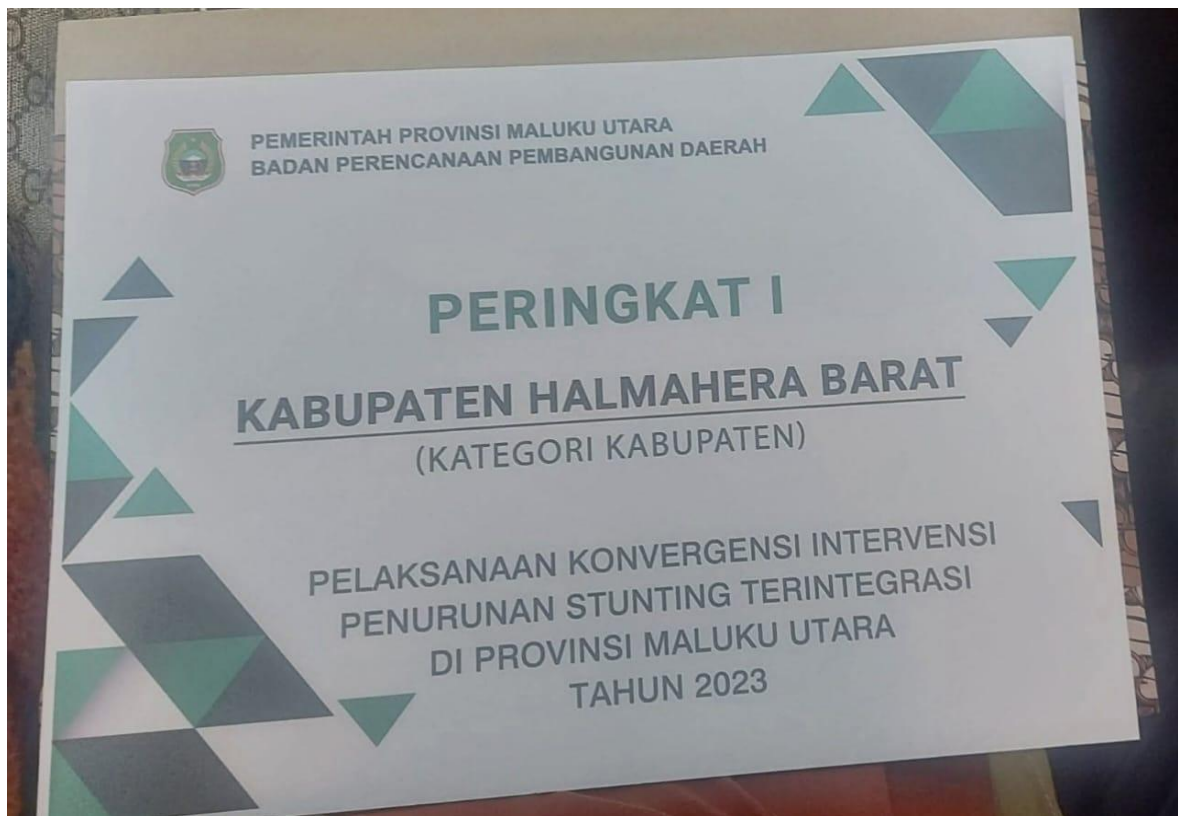
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TERBAIK II

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

(KATEGORI KABUPATEN)

PENGHARGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024





DINAS KESEHATAN
PROVINSI
MALUKU UTARA



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Germas Indonesia
Meds 2019

SERTIFIKAT

Penghargaan

NOMOR: 840/15-02/P2/2023

Diberikan kepada

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT**

Atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAPF) rate ≥ 2 per
100.000 penduduk <15 tahun dan Discarded (bukan campak-bukan rubela)
rate ≥ 2 per 100.000 penduduk pada tahun 2022



Direktur Pengelolaan Imunisasi
Kementerian Kesehatan RI

dr. Prima Josephine, MKM



Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Maluku Utara

dr. Idhar Sidi Umar, M. Kes



DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
(DPP LPM - RI)

Memberikan Penghargaan Kepada :

BUPATI HALMAHERA BARAT

Atas Dukungan dan Kerjasamanya Membangun Kemitraan LPM di Desa/Kelurahan

Ketua Umum



DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., MT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI MALUKU UTARA

CERTIFICATE OF APPRECIATION

No: 1464/C7.32/KP.11.02/2022
Diberikan kepada:

James Ulang, S.Pd., M.M

BUPATI HALMAHERA BARAT

Atas dukungan dan peran serta dalam pelaksanaan
Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka
di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022



September 2022

Antono, S.Pd., M.Si
NIP. 196005182001121001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14.B/LHP/XIX.TER/5/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ternate, 27 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Marius Sirumapea, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. 4786

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/531/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat**
di
Jailolo

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain dengan melakukan perbaikan dokumen perencanaan jangka menengah yang lebih berorientasi hasil.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum sepenuhnya optimal dalam mengawal implementasi SAKIP. Hal ini karena beberapa dokumen kinerja terbaru seperti Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 belum disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui esr.menpan.go.id.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan nilai **50,08** dengan predikat **“CC”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Cukup”**, yaitu **implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	15,38	15,83
2. Pengukuran Kinerja	30	11,67	11,96
3. Pelaporan Kinerja	15	7,40	7,66
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,47	14,63
Nilai Hasil Evaluasi	100	48,92	50,08
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	CC

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD tahun 2021-2026 yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen lainnya sampai pada tingkat Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

perencanaan kinerja di antaranya:

- a. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Perangkat Daerah (PD) belum seluruhnya mengunggah perencanaan kinerja terbaru pada laman *esr.menpan.go.id*, terutama terkait dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024;
- b. Sebagian besar kinerja yang tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 telah berorientasi hasil (*outcome*), namun perencanaan sebagian besar kinerja pada level Perangkat Daerah (PD) masih bersifat *output*, sehingga belum menggambarkan kinerja berorientasi hasil/*outcome* sesuai dengan level kerjanya;
- c. Pada Tingkat PD, masih ditemukan adanya ketidakselarasan antara kinerja perencanaan jangka menengah dengan perencanaan kinerja jangka pendek (tahunan), sehingga capaian kinerja yang dihasilkan setiap tahun, belum tergambar dengan baik. Pada beberapa PD ditemukan Perjanjian Kinerja (PK) yang belum menggambarkan kondisi yang akan dicapai, contoh pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan dokumen PK yang diunggah pada *esr.menpan.go.id*, narasi sasaran yang dituangkan merupakan nama dari Program/Kegiatan yang ada, sehingga kinerja tahunan belum menggambarkan kinerja berorientasi hasil dan tidak selaras dengan kinerja yang dituangkan pada Renstra.
- d. Rumusan Indikator Kinerja yang dituangkan dalam rumusan sasaran strategis pada perencanaan kinerja Pemerintah Daerah maupun PD sebagian besar belum memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound*), terutama pada hal spesifik, terukur, dan relevan. Selain itu, masih ditemui beberapa indikator yang belum memenuhi kriteria cukup untuk mengawal pencapaian sasaran strategis.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan sebagian besar PD telah menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU).. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya:

- a. Sebagian besar indikator kinerja belum diikuti dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data. Hal ini mengakibatkan pengumpulan dan perhitungan indikator kinerja belum sepenuhnya dapat diyakini relevan untuk menggambarkan pencapaian kinerja yang ditetapkan;
- b. Belum terdapat mekanisme atau SOP internal yang jelas untuk mengatur

pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja, sehingga keandalan data kinerja untuk menggambarkan kondisi capaian kinerja masih belum optimal.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 untuk tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian tingkat PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya:

- a. Kualitas pelaporan kinerja terutama pada tingkat PD belum sepenuhnya baik. Masih ditemukan laporan kinerja yang belum menyajikan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah. Selain itu, analisis terhadap faktor keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja juga belum dituangkan secara komprehensif, sehingga informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya:

- Evaluasi internal atas implementasi akuntabilitas kinerja internal belum dilakukan pada seluruh PD, sehingga evaluasi internal belum dapat menggambarkan secara utuh atas implementasi SAKIP dari sisi internal pemerintah daerah itu sendiri.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mendorong pembaharuan seluruh dokumen kinerja (RPJMD, Renstra, PK, IKU, dan Laporan Kinerja) dan memperhatikan relevansi dokumen kinerja pada tahun berjalan dan menyampaikannya kepada Kementerian PANRB pada laman *esr.menpan.go.id* atau melalui publikasi pada media lain milik pemerintah daerah;
- 2) Memastikan kinerja yang dituangkan dalam sasaran strategis setiap PD merupakan kinerja yang telah berorientasi hasil/*outcome* dengan memperhatikan tingkat pengampu kinerjanya;
- 3) Melakukan reviu secara menyeluruh terhadap keselarasan perencanaan

kinerja jangka menengah dengan perencanaan kinerja tahunan, khususnya pada tingkat PD, baik pada Renstra, IKU, dan Perjanjian Kinerja (PK). Selain itu, perlu memastikan bahwa perencanaan kinerja jangka pendek (tahunan) khususnya yang tertuang dalam PK merupakan rumusan kinerja yang menggambarkan kondisi atau hasil yang akan dicapai, bukan hanya nomenklatur program atau kegiatan;

- 4) Memastikan ketepatan indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur tujuan maupun sasaran strategis pada perencanaan kinerja Pemerintah Daerah maupun PD dengan memperhatikan ketepatan indikator kinerja dengan levelnya, serta memenuhi kriteria spesifik, terukur, dan relevan, sehingga indikator yang ditetapkan memenuhi unsur cukup untuk menggambarkan pencapaian kinerja;
- 5) Menyusun dokumen IKU untuk Pemerintah Daerah dan seluruh PD yang memuat kinerja utama masing-masing organisasi sesuai dengan perencanaan terbaru;
- 6) Memastikan setiap indikator kinerja yang ditetapkan diikuti dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang jelas dan relevan. Hal ini untuk memastikan pengukuran kinerja yang dilakukan telah disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;
- 7) Mendorong dilakukannya pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang konsisten dengan menetapkan kebijakan atau SOP internal yang spesifik mengatur terhadap pengumpulan data kinerja, untuk memastikan ketersediaan dan keandalan data dalam pengukuran kinerja dapat terjaga;
- 8) Menyempurnakan kualitas pelaporan kinerja khususnya pada tingkat PD dengan menyajikan informasi yang memadai, seperti adanya analisis dan perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan terhadap target jangka menengah dan target/capaian tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, laporan kinerja diharapkan memuat eksplorasi yang komprehensif terkait analisis faktor pendorong/penghambat dalam pencapaian kinerja;
- 9) Mendorong Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan evaluasi internal kepada PD dengan menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, mendorong pelaksanaan evaluasi internal yang dapat memberikan rekomendasi spesifik untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja, serta memastikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang akan dilakukan, dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dengan optimal, sehingga mendorong penerapan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Maluku Utara;
4. Bupati Halmahera Barat.